



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**20
24**



<https://bkpsdm.cirebonkab.go.id>



[bkpsdm.cirebonkab](https://www.instagram.com/bkpsdm.cirebonkab)

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini memuat informasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini merupakan laporan tahun terakhir dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 secara menyeluruh menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan kinerja hingga pencapaian sasaran kinerja, realisasi anggaran, kebijakan pemerintah, inovasi dan penghargaan-penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun, diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian, dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Sumber, 18 Februari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si

NIP. 19681022 198803 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Tata Pemerintah pada Perangkat Daerah yang baik merupakan refleksi dari Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Sebagaimana halnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah Pembina Kepegawaian Daerah di Kabupaten Cirebon selalu berinovasi untuk meningkatkan kinerja dengan menjadi ASN Cirebon Unggul dengan slogan SIAP (Santun, Inovatif, Akuntabel dan Profesional).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 masuk kategori Berhasil, karena capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yakni Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian sebesar 102,25%. Adapun pagu anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. 24,086,761,300.00 terealisasi sebesar Rp. 23,237,974,012.00, dan jika diukur dalam presentase sebesar 96,48%.

Dalam dokumen perjanjian kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian, Meningkatnya Aparatur yang Profesional dan Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel. Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, melaksanakan 3 (tiga) Program, 1 (satu) Program Penunjang dan 2 (dua) Program Teknis, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Catatan Hasil Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh predikat BB (sangat baik) dengan nilai angka evaluasi sebesar 73.60, dengan rekomendasi sebagaimana yang terlampir pada Lampiran dan telah ditindaklanjuti.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Cashcading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah..... 2

1.2 Tugas, Fungsi serta Peta Jabatan..... 3

1.3 Isu-Isu Strategis..... 5

1.4 Dukungan SDM, Sarana - Prasarana dan Anggaran..... 5

1.5 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023..... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD..... 12

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 15

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 17

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 22

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....28

A. Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon28

3.1 Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian....30

3.2. Sasaran 2 Meningkatnya Aparatur yang Profesional 39

3.3 Sasaran 3 Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel..... 51

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja..... 54

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra 2019-2024..... 56

3.6 Dukungan Inovasi dalam Pencapaian Kinerja..... 56

3.7 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran Perangkat Daerah dalam Pencapaian Sasaran..... 58

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024 59

BAB IV PENUTUP 62

4.1 Kesimpulan 62

4.2 Langkah Perbaikan 62

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5

Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 6

Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan 7

Tabel 1.4 Jumlah Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja 7

Tabel 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana BKPSDM 8

Tabel 1.6 Anggaran BKPSDM 2024 9

Tabel 1.7 Rincian Anggaran BKPSDM 2024..... 10

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 13

Tabel 2.2 Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Cirebon 14

Tabel 2.3 Sasaran Strategi, Program dan Kegiatan 15

Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan 16

Tabel 2.5 Anggaran per Sasaran Strategis 18

Tabel 2.6 Tabel Struktur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024 19

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2024..... 23

Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2024..... 24

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 28

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran BKPSDM Kab. Cirebon Tahun 2024 29

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan..... 30

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja 2024 30

Tabel 3.5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024..... 31

Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 39

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja 2024 40

Tabel 3.8 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 40

Tabel 3.9 Pemenuhan Penataan ASN 2024 45

Tabel 3.10 Kediklatan Pegawai 2024 48

Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan..... 51

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja 2024 51

Tabel 3.13 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 52

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 55

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis..... 56

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran 2024 59

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran 2024 60

Tabel 3.18 Realisasi dan Efisiensi Anggaran 61

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Cascading Kinerja	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon	3
Gambar 1.3 Peta Jabatan BKPSDM	4
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan tingkat Pendidikan	6
Gambar 1.5 Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Golongan	6
Gambar 2.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon.....	26
Gambar 2.2 Aplikasi SIMONEK	25
Gambar 2.3 Aplikasi e-SAKIP REVIU	26
Gambar 2.4 Aplikasi e-Perencanaan	26
Gambar 2.5 Aplikasi e-Kinerja BKN	27
Gambar 2.6 Aplikasi SIPD Penatausahaan	27
Gambar 3.1 Layanan Kepegawaian melalui SIMPEG	35
Gambar 3.2 Aplikasi E-Kinerja BKN	46
Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis	32

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Cashcading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas dan Fungsi*
3. *Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar Hukum penyusunan LKjIP Instansi Pemerintah meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 diharapkan dapat :

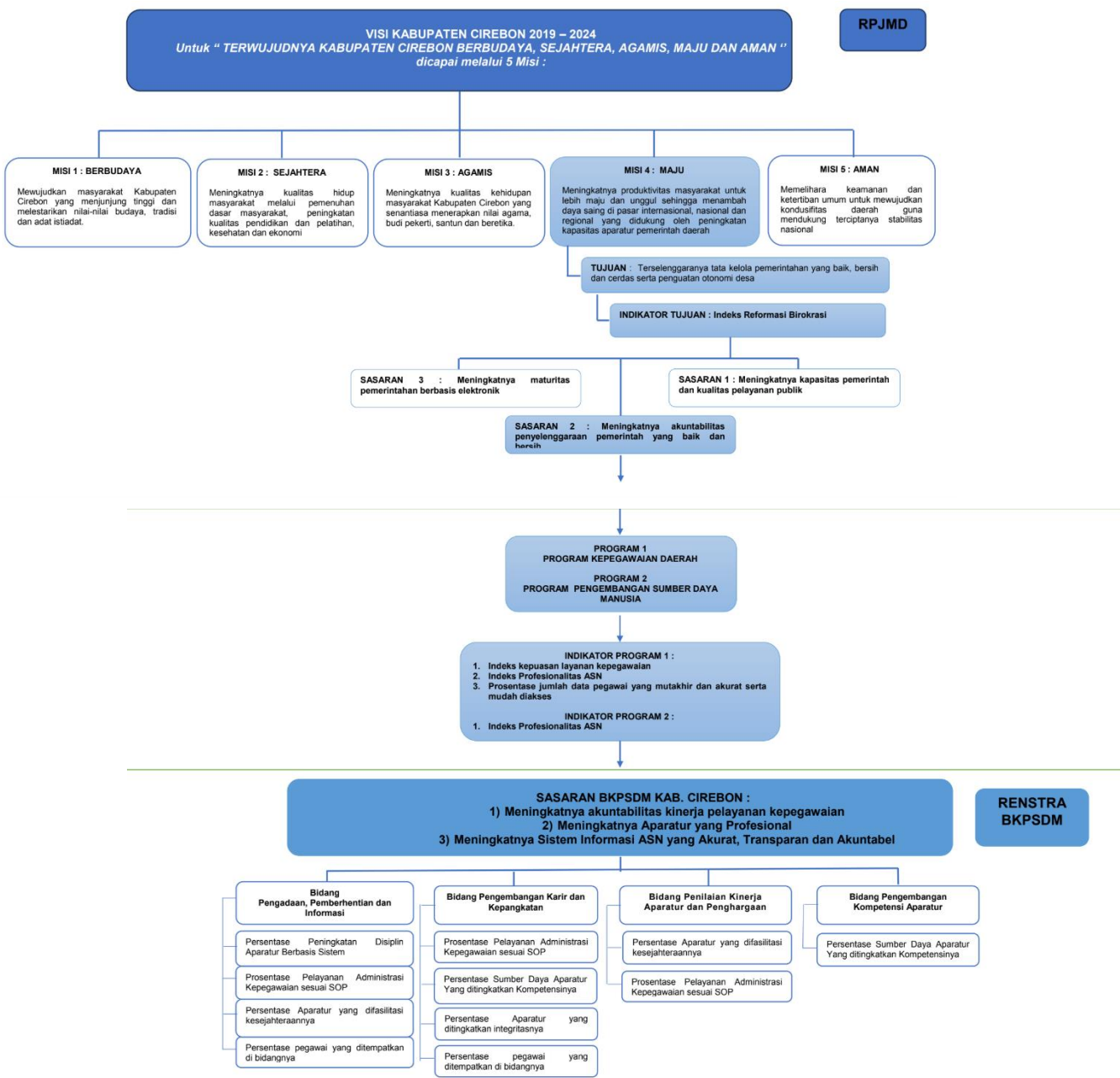
1. Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
2. Mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kinerja;

4. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 **Cashcading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

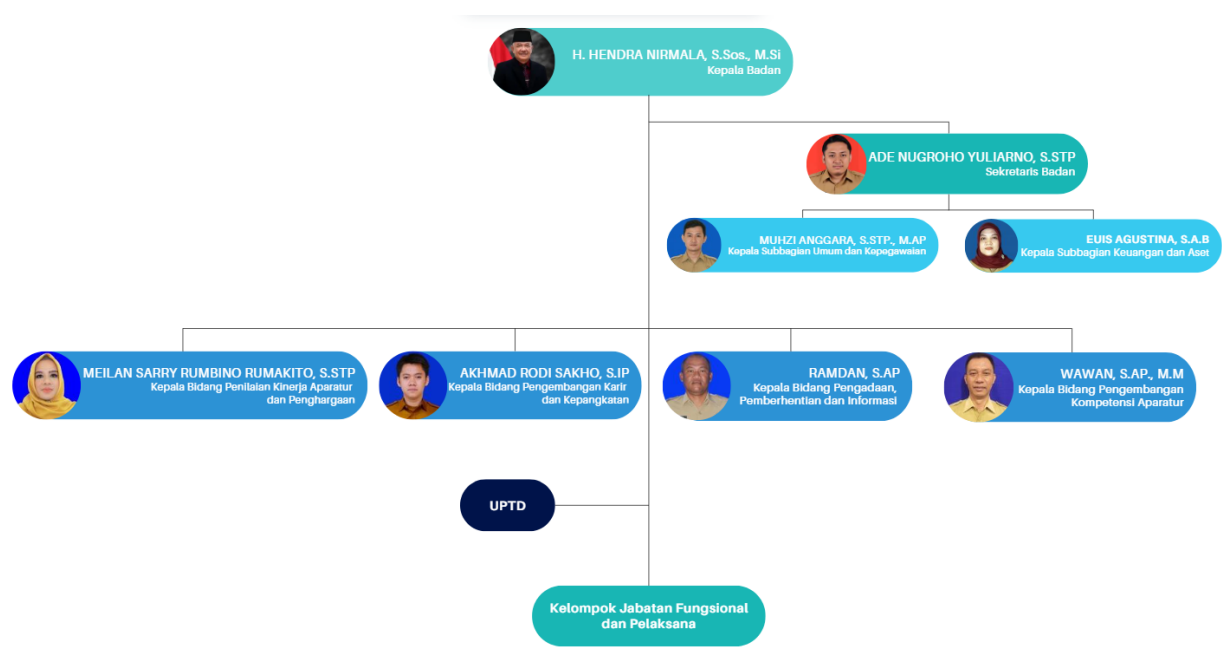
Gambar 1.1 **Cashcading Kinerja**



Sumber : RPD 2019-2024, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019-2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2023

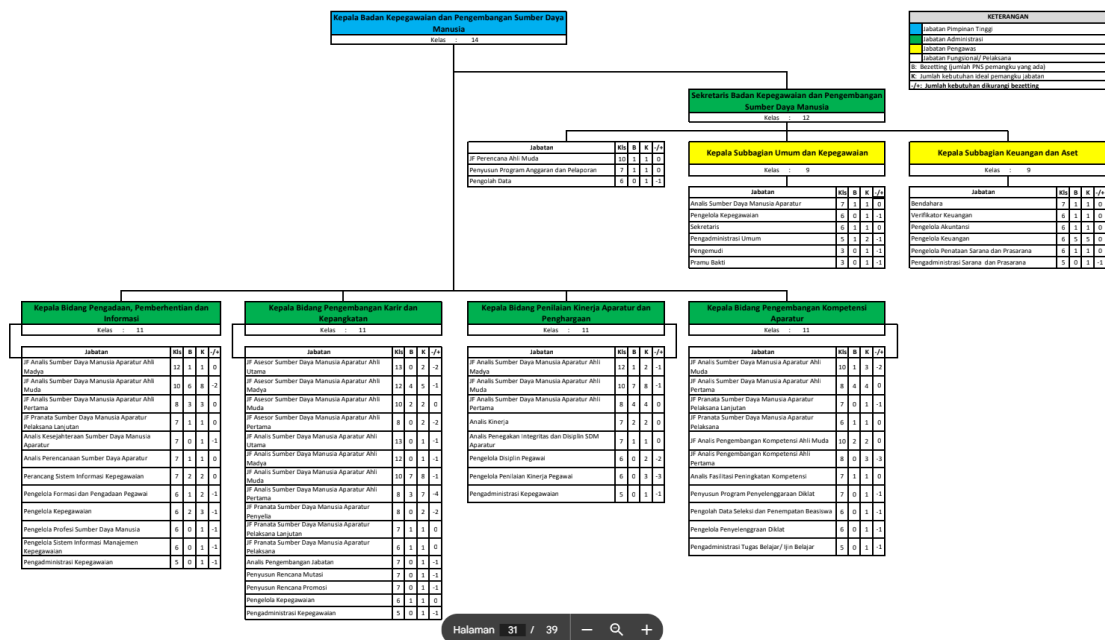
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- 2. Pengelolaan data dan informasi ASN;
- 3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

4. Peningkatan kapasitas ASN;
5. Pengembangan Karir ASN;
6. Pembinaan ASN;
7. Pendidikan dan Pelatihan ASN;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
9. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Gambar 1.3 Peta Jabatan BKPSDM



1.3 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dengan mengetahui isu strategis, Perangkat Daerah dapat menganalisis bagian tertentu yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangan organisasi. Pengidentifikasian isu- isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja organisasi. Isu-isu strategis dalam manajemen kepegawaian antara lain :

- 1. Pemenuhan SDM di setiap Perangkat Daerah;
- 2. Target 20 JPL per tahun bagi ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengembangkan kompetensi melalui diklat;
- 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan kepegawaian; dan
- 4. Pengembangan manajemen talenta.
- 5. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PPPK

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

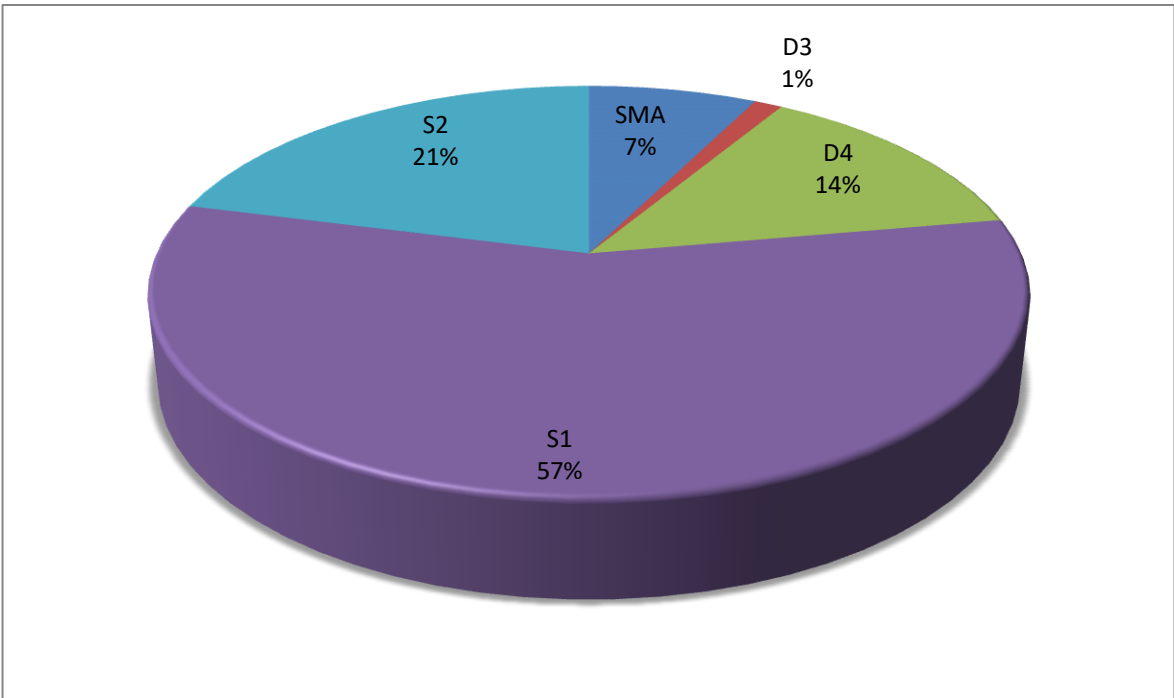
Jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon per Desember 2024 sebanyak 85 orang terdiri dari 81 Orang PNS dan 4 Orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK), dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan				
No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	4 orang	2 orang	6 orang
4.	D3	-	1 orang	1 orang
5.	D4	6 orang	5 orang	11 orang
6.	S1	22 orang	24 orang	46 orang
7.	S2	13 orang	4 orang	17 orang
Jumlah				81 orang

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan tingkat Pendidikan



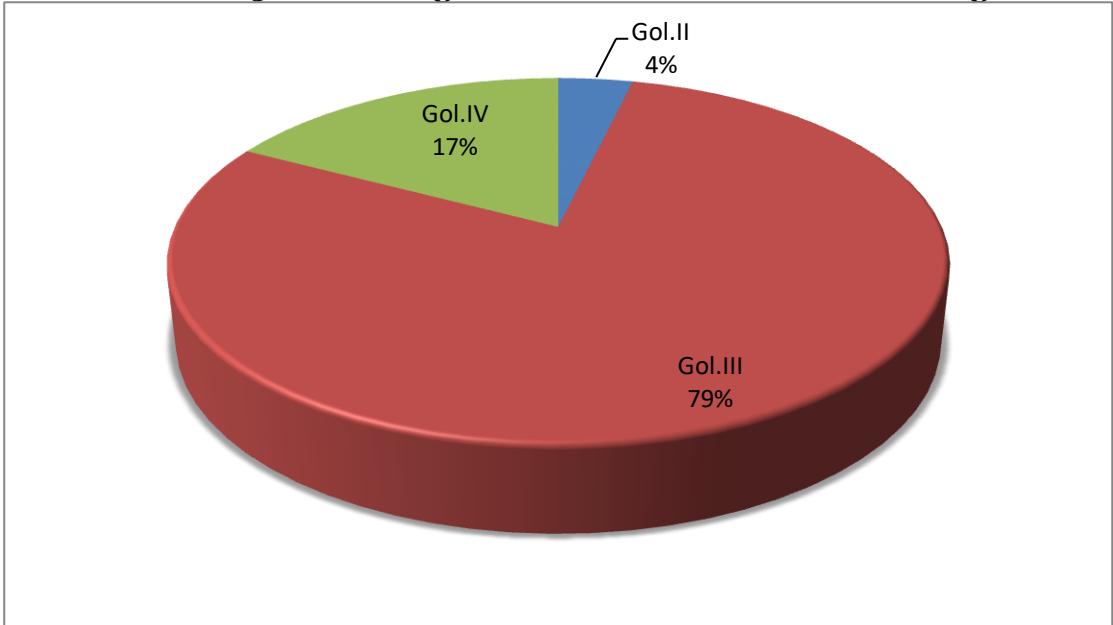
b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	12 orang	2 orang	14 orang
2.	Golongan III	31 orang	33 orang	64 orang
3.	Golongan II	2 orang	1 orang	3 orang
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah PNS				81 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Golongan



c. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	1 orang	-	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang	-	1 orang
3.	Kepala Bidang	4 orang	-	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 orang	1 orang	2 orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	29 orang	21 orang	50 orang
6.	Jabatan Fungsional Umum	10 orang	13 orang	23 orang
7.	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	4 orang	-	4 orang
Jumlah				85 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

d. Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

Tabel 1.4 Jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja

No.	Bidang	Kebutuhan		
		Pegawai Sesuai Beban Kerja	Bezetting	Selisih
1.	Kepala Badan	1 orang	1 orang	-
2	Sekretaris	1 orang	1 orang	-
3.	Sekretariat	22 orang	13 orang	9 orang
4.	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	26 orang	18 orang	8 orang
5.	Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan	38 orang	22 orang	16 orang
6.	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	24 orang	15 orang	9 orang
7.	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	20 orang	11 orang	9 orang
Jumlah		132 Orang	81 Orang	51 Orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon masih perlu dilakukan peremajaan atau penggantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana BKPSDM

Kode Akun	Nama Asset	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
Aset Tetap			
1.3.01.01.01	Tanah Persil	2 Unit	2.256.746.355
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2 Unit	301.150.000
1.3.02.05.01	Alat Kantor	241 Unit	1.389.795.623
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	821 Unit	1.697.251.906
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja Pejabat/Ruang Rapat	23 Unit	91.233.904
1.3.02.06.01	Alat Studio	19 Unit	743.136.819
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	1 Unit	2.511.041
1.3.02.10.01	Komputer Unit	151 Unit	1.916.149.213
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	58 Unit	389.849.870
1.3.03.01	Bangunan Gedung	8 Unit	8.475.345.780
1.3.03.04	TuguTitik Kontrol/Pasti	1 Unit	174.294.429
1.3.04.04	Jaringan	4 Unit	174.947.542
Aset Tetap Lainnya			
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	58 Unit	13.732.000

Sumber data: Berita Acara Rekonsiliasi 2024

Dukungan Anggaran

Dukungan pendanaan untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp 19.354.987.800,- dan pada bulan Oktober 2024 disusunlah APBD Perubahan (APBD-P) 2024 sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub kegiatan di BKPSDM Kabupaten Cirebon karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sebesar Rp 24.086.761.300,- Ringkasan APBD dan APBD-P 2024 pada BKPSDM Kabupaten Cirebon di tunjukan pada Tabel I.6, sebagai berikut :

Tabel 1.6 Anggaran Tahun 2024			
Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	/Berkurang (Rp)
5. Belanja Daerah	19.354.987.800	24.086.761.300	4.731.773.500 (bertambah)
5.1. Belanja Operasi	19.127.052.800	23.210.703.300	4.083.650.500 (bertambah)
5.1.01. Belanja Pegawai	14.349.085.000	16.281.092.000	1.932.007.000 (bertambah)
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa	4.777.967.800	6.929.611.300	2.151.643.500 (bertambah)
5.2 Belanja Modal	227.935.000	876.058.000	648.123.000 (bertambah)
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.935.000	876.058.000	648.123.000 (bertambah)
Jumlah	19.354.987.800	24.086.761.300	4.731.773.500

(Sumber: DPA dan DPPA BKPSDM Kabupaten Cirebon)

Rincian program dan kegiatan dari APBD dan APBD-Perubahan Tahun 2024 pada BKPSDM Kabupaten Cirebon ditunjukan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Rincian Anggaran BKPSDM Tahun 2024		
Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.587.870.500	18.471.534.500
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.394.500	120.144.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.360.660.600	16.292.667.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.337.500	1.346.337.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363.756.300	371.786.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.721.600	340.598.600
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.825.706.800	2.673.857.700
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.225.882.500	1.074.005.500
Mutasi dan Promosi ASN	492.144.500	604.817.800
Pengembangan Kompetensi ASN	655.989.300	543.343.900
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	451.690.500	451.690.500
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	941.410.500	2.941.369.100
Pengembangan Kompetensi Teknis	134.757.000	134.757.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	806.653.500	2.806.612.100
Jumlah	19.354.987.800	24.086.761.300

(Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon)

1.5 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
PERENCANAAN KINERJA		Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP sebanyak 5 Rekomendasi telah seluruhnya ditindaklanjuti
1.	Membuat Dokumen Pohon Kinerja.	
PENGUKURAN KINERJA		
2.	Membuat Laporan Pencapaian Kinerja Unit atau Bidang di Perangkat Daerah sesuai Target yang telah ditetapkan.	
PELAPORAN KINERJA		
3.	Membuat SK Tim Reviu Internal LAKIP dan Berita Acara telah direviu secara Internal yang ditandatangani oleh Kepala Badan.	
4.	Menambahkan Dasar Hukum pada LAKIP sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
5.	Membuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP secara Mandiri yang ditandatangani oleh Kepala Badan.	

(Sumber : PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon)



BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

- 1. Tujuan, Sasaran dan indicator Kinerja OPD
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 5. Instrumen Pendukung
- 6. Capaian Kinerja OPD

Perencanaan yang baik berdampak pada keberhasilan kinerja Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu adanya perencanaan strategis yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Cirebon 2019- 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024

Visi	Misi	Sasaran Daerah
TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN	1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat	1. Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon
	2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	2. Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat
		3. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
		4. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial
		5. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
	3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika	6. Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama
	4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
		8. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
		9. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
		10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		11. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
		12. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih
		13. Meningkatnya maturitas pemerintahan

		berbasis elektronik
		14. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa
	5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional	15. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
		16. Menurunnya resiko bencana

(Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024)

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Cirebon mendukung pada pencapaian Misi ke-4 yakni Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan Sasaran 12 yakni Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, yang diukur dengan indikator capaian sasaran Indeks Profesionalitas ASN meningkat.

Tujuan Jangka menengah BKPSDM Kabupaten Cirebon selama 5 tahun anggaran adalah Meningkatkan Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi dan Terintegrasi, selanjutnya mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Cirebon

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Nilai	85,00	86,00	88,00	90,00	92,00	95,00
2	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	63,00	65,00	71,00	72,00	74,00	75,00
3	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	Prosentase Jumlah Data Pegawai yang Mutakhir dan Akurat serta Mudah Diakses	Prosen	98,44	98,80	99,10	99,40	99,70	100

(Sumber: RENSTRA BKPSDM Kabupaten Cirebon 2019-2024)

Dalam upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Cirebon didukung oleh 3 program dan 11 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN
			Mutasi dan promosi ASN
			Pengembangan kompetensi ASN
			Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
2	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN
			Mutasi dan promosi ASN
			Pengembangan kompetensi ASN
			Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
		Program Pengembangan SDM	Pengembangan Kompetensi Teknis
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
3	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN
			Mutasi dan promosi ASN
			Pengembangan kompetensi ASN
			Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

		Program Pengembangan SDM	Pengembangan Kompetensi Teknis
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

(Sumber: Permendagri 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan)

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	1. Mengirim ASN dalam pendidikan dan pelatihan; 2. Membangun sumber daya aparatur yang kompeten, professional, berkinerja tinggi, efisien dan efektif; 3. Mewujudkan ASN yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi, sejahtera, efisien dan efektif; 4. Meningkatkan kinerja dan penyajian hasil pengukuran sebagai bahan pengambilan kebijakan; 5. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi jabatan fungsional; 6. Mengirim ASN dalam diklat untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja; 7. Pengelolaan data kepegawaian dengan memanfaatkan dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi;	i. Mengembangkan manajemen talent pool untuk menuju merit system pengelolaan kepegawaian; ii. Mengembangkan potensi aparatur agar lebih kompeten dan memiliki daya bersaing; iii. Perencanaan Pegawai; iv. Perbaikan Sistem Rekrutmen pegawai; v. Profesionalisme PNS; vi. Penguatan Jabatan Fungsional; vii. Penerapan Manajemen Kinerja viii. Mewujudkan layanan kepegawaian secara <i>less paper</i> ix. Meningkatkan mutu pelayanan publik dengan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana;

		<div>8. Pengiriman ASN dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan dalam pengembangan dan pelestarian budaya;</div> <div>9. Menyusun pedoman pola karir sebagai panduan karir PNS sehingga mampu berkinerja secara optimal;</div> <div>10. Rekomendasi pengukuran kompetensi sebagai bahan pengiriman diklat ASN untuk meningkatkan kompetensi;</div> <div>11. Meningkatkan kesejahteraan ASN untuk mendukung reformasi birokrasi;</div> <div>12. Mewujudkan ASN yang berbudaya guna melestarikan kebudayaan dan meningkatkan kinerja pegawai;</div>	
2.	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	<div>1. Melaksanakan publikasi data dan informasi sesuai dengan jenis informasi;</div> <div>2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian mengikuti perkembangan teknologi informasi;</div> <div>3. Meningkatkan kinerja sistem informasi kepegawaian untuk meningkatkan mutu layanan;</div> <div>4. Sistem informasi yang terintegrasi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.</div>	

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

BKPSDM Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 19.354.987.800,-, dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertikal dan kebijakan Kepala Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024, anggaran BKPSDM Kabupaten Cirebon mengalami perubahan menjadi Rp 24.086.761.300,-.

Anggaran belanja Tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Cirebon, dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.5 Anggaran per Sasaran Strategis				
No.	Sasaran	Anggaran Perubahan (Rp)	%	Keterangan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	19.314.953.400,-	80,19%	Sebesar 80,19% dibandingkan dengan total belanja BKPSDM tahun 2024 (Termasuk Gaji dan TPP)
2	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	4.564.865.400,-	18,95%	Sebesar 18,95% dibandingkan dengan total belanja BKPSDM tahun 2024
3	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	206.942.500,-	0,86%	Sebesar 0,86% dibandingkan dengan total belanja BKPSDM tahun 2024
	Jumlah	24.086.761.300,-	100,00%	

(Sumber: DPPA BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2024)

Struktur Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian	1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.587.870.500	18.471.534.500	2.883.664.000 (bertambah)
	1.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.394.500	120.144.500	8.250.000 (berkurang)
	1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.437.500	12.187.500	8.250.000 (berkurang)
	1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.731.000	4.731.000	-
	1.1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.226.000	103.226.000	-
	1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.360.660.600	16.292.667.600	1.932.0007.000 (bertambah)
	1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.349.085.000	16.281.092.000	1.932.007.000 (bertambah)
	1.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.536.700	6.536.700	-
	1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.038.900	5.038.900	-
	1.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.337.500	1.346.337.500	800.000.000 (bertambah)
	1.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.900	7.500.900	-
	1.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.058.000	876.058.000	800.000.000 (bertambah)
	1.1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.187.900	2.187.900	-
	1.1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.324.100	68.324.100	-

	1.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	83.856.200	83.856.200	-
	1.1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	183.975.700	183.975.700	-
	1.1.3.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.301.200	15.301.200	-
	1.1.3.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.927.600	102.927.600	-
	1.1.3.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.205.900	6.205.900	-
	1.1.4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	363.756.300	371.786.300	8.030.000 (bertambah)
	1.1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.761.200	328.761.200	-
	1.1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.995.100	43.025.100	8.030.000 (bertambah)
	1.1.5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	188.721.600	340.598.600	151.877.000 (bertambah)
	1.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.565.000	22.565.000	-
	1.1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.189.000	10.189.000	-
	1.1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.967.600	307.844.600	151.877.000 (bertambah)
	1.2	Program Kepegawaian Daerah	843.418.900	843.418.900	-
	1.2.1	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN	273.751.700	273.751.700	-
	1.2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	196.019.900	196.019.900	-
	1.2.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	107.999.500	107.999.500	-

	1.2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	23.377.900	23.377.900	-
	1.2.2	Mutasi dan promosi ASN	162.123.100	162.123.100	
	1.2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	162.123.100	162.123.100	-
	1.2.3	Pengembangan kompetensi ASN	80.146.800	80.146.800	
	1.2.3.5	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	80.146.800	80.146.800	-
	1.2.4	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	381.737.500	381.737.500	-
	1.2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	151.466.200	151.466.200	-
	1.2.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	87.338.700	87.338.700	-
	1.2.4.3	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	34.946.800	34.946.800	-
2. Meningkatnya Aparatur yang Profesional	2.1	Program Kepegawaian Daerah	1.623.468.400	1.623.496.300	27.900 (bertambah)
	2.1.1	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN	539.665.700	539.665.700	-
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	539.665.700	539.665.700	-
	2.1.2	Mutasi dan promosi ASN	330.021.400	442.694.700	107.756.930 (bertambah)
		Pengelolaan Mutasi ASN	92.794.700	205.468.000	112.673.300 (bertambah)
		Pengelolaan Promosi ASN	237.226.700	237.226.700	-
	2.1.3	Pengembangan kompetensi ASN	575.842.500	463.197.100	112.645.400 (berkurang)
	2.1.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	207.325.000	207.325.000	-
	2.1.3.2	Pengelolaan Assessment Center	114.912.800	138.239.500	23.326.700 (bertambah)
	2.1.3.3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	85.381.600	85.381.600	-
	2.1.3.4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	17.203.900	17.203.900	-
	2.1.3.5	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	151.019.200	15.047.100	135.972.100 (berkurang)

	2.1.4	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	177.938.800	177.938.800	-
	2.1.4.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	107.985.800	107.985.800	-
	2.1.4.2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	69.953.000	69.953.000	-
	2.2	Program Pengembangan SDM	941.410.500	2.941.369.100	1.999.958.600 (bertambah)
	2.2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	134.757.000	134.757.000	-
	2.2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	134.757.000	134.757.000	-
	2.2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	806.653.500	2.086.612.100	1.999.958.600 (bertambah)
	2.2.2.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	50.688.500	50.688.500	-
	2.2.2.2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	755.965.000	2.755.923.600	1.999.958.600 (bertambah)

		Kepemimpinan, dan Prajabatan			
3. Meningkatkan Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	3.1	Program Kepegawaian Daerah	358.819.500	206.942.500	151.877.000 (berkurang)
	3.1.1	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN	358.819.500	206.942.500	151.877.000 (berkurang)
	3.1.1.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	266.440.600	114.563.600	151.877.000
	3.1.1.2	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	92.378.900	92.378.900	-

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran;
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BKPSDM Kabupaten Cirebon menyusun perjanjian kinerja perubahan karena terdapat perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran seperti alokasi anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	Poin	95,00
2	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	75
3	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	Prosentase jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses	Prosen	100

(Sumber: RENSTRA BKPSDM Kabupaten Cirebon 2019-2024)

Untuk Mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.587.870.500
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.394.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.360.660.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.337.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363.756.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.721.600
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.825.706.800
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.225.882.500
Mutasi dan Promosi ASN	492.144.500
Pengembangan Kompetensi ASN	655.989.300
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	451.690.500
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	941.410.500
Pengembangan Kompetensi Teknis	134.757.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	806.653.500
Jumlah	19.354.987.800

(Sumber: DPA BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2024)

Pada Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon melaksanakan reviu Perjanjian kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya

perubahan Anggaran kegiatan dan telah ditetapkan nya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024.

Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	Poin	95,00
2	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	75
3	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	Prosentase jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses	Prosen	100

(Sumber: RENSTRA BKPSDM Kabupaten Cirebon 2019-2024)

Untuk Mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

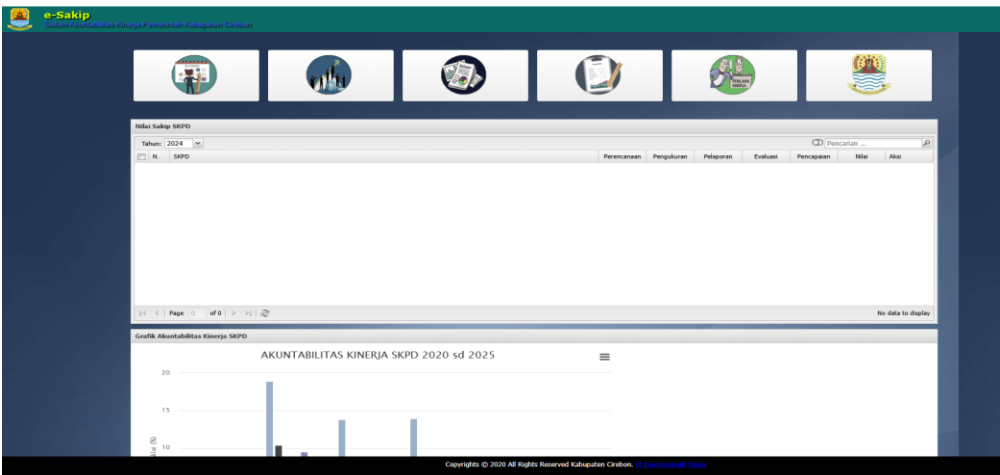
Uraian	Setelah Perubahan Jumlah (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.471.534.500
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.144.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.292.667.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.346.337.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.786.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.598.600
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.673.857.700
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.074.005.500
Mutasi dan Promosi ASN	604.817.800
Pengembangan Kompetensi ASN	543.343.900
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	451.690.500
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.941.369.100
Pengembangan Kompetensi Teknis	134.757.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.806.612.100
Jumlah	24.086.761.300

(Sumber: DPPA BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2024)

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

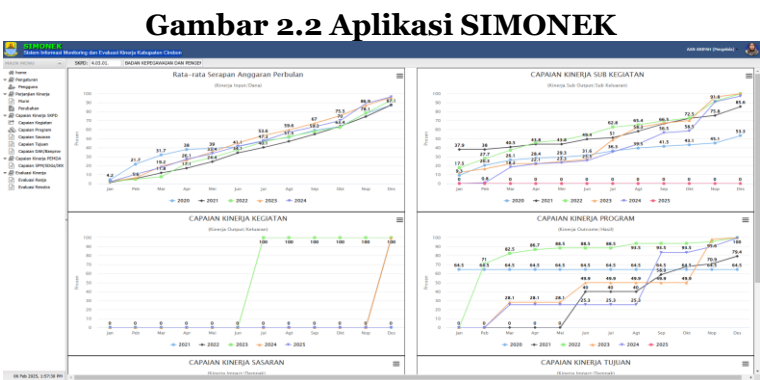
- 1. Instrumen Pendukung Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi <https://sakip.cirebonkab.go.id/sakip/dashboard> yang digunakan untuk penilaian Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah.

Gambar 2.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon



Sumber: <https://sakip.cirebonkab.go.id/sakip/dashboard>

- 2. Instrumen pendukung capaian kinerja di Badan Kepegawaian Kabupaten Cirebon lainnya yaitu aplikasi SIMONEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Cirebon) yang merupakan Aplikasi untuk mengukur capaian kinerja organisasi.

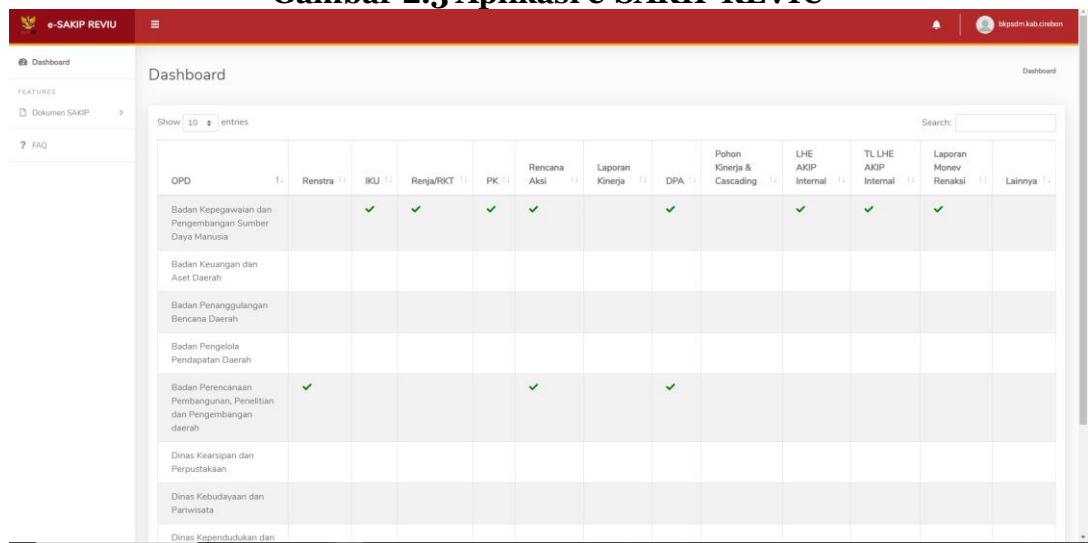


Sumber : <https://simonek.cirebonkab.go.id/dashboard>

- 3. e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan

sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

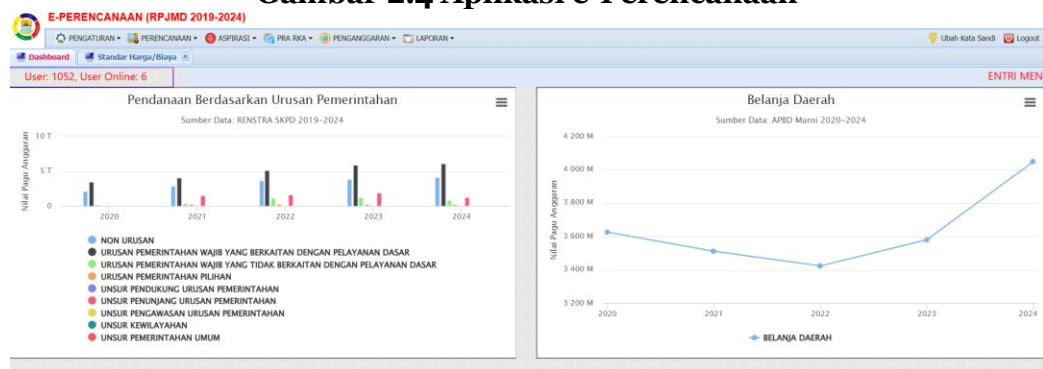
Gambar 2.3 Aplikasi e-SAKIP REVIU



Sumber : <https://esr.menpan.go.id/index.php/home>

4. E-Perencanaan adalah Sistem Aplikasi yang dibangun oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pemerintah daerah. Sistem ini bertujuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

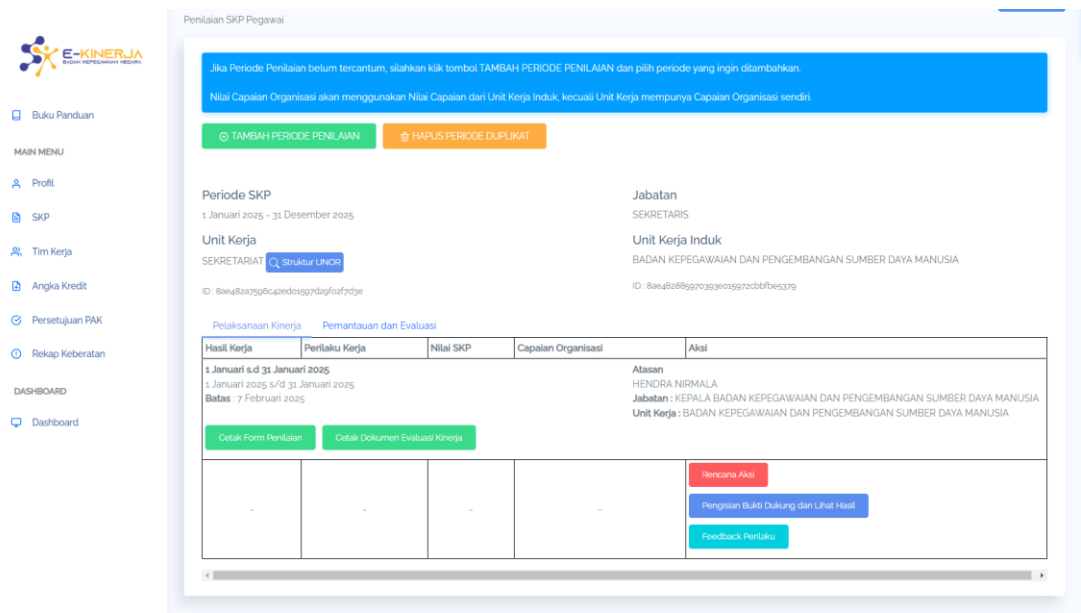
Gambar 2.4 Aplikasi e-Perencanaan



Sumber : <https://perencanaan.cirebonkab.go.id>

5. E-Kinerja BKN adalah Sistem aplikasi yang di bangun oleh Badan kepegawaian Negara sebagai upaya mempermudah pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara. Aplikasi e-Kinerja BKN ini terintegrasi dengan Sistem informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan penilaian kinerja ASN.

Gambar 2.5 Aplikasi e-Kinerja BKN



Sumber : <https://kinerja.bkn.go.id>

6. SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah Sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), aplikasi ini merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola data keuangan, aset dan pelaporan anggaran secara terstruktur dan digital

Gambar 2.6 Aplikasi SIPD Penatausahaan



Sumber : <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan>



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

- Bab 3 Berisi :**
- 1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
 - 2. *Capaian Kinerja Lainnya*
 - 3. *Efisiensi Anggaran*
 - 4. *Inovasi*

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan BKPSDM Kabupaten Cirebon. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah :

SASARAN :

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian
- 2. Meningkatnya Aparatur yang Profesional
- 3. Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel

Indikator capaian kinerja tahun 2024 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	REALISASI/ KINERJA	CAPAI AN (%)	Nilai Peringk at Kinerja
2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan layanan kepegawaian (Nilai)	Rp 19,314,953,400	Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan IV oleh BKAD	Rp 18,592,174,916	96,26	
		95 Poin	Hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Kepegawaian	95,09 Poin	100,09	Sangat Baik
Meningkatnya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	Rp 4,564,865,400	Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan IV oleh BKAD	Rp 4,459,924,196	97,70	
		75 Poin	Hasil perhitungan dari Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) BKN tentang Nilai Layanan Indeks Profesionalitas ASN	81,10	108,13	Tinggi
Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	Prosentase jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses (Prosen)	Rp 206,942,500	Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan IV oleh BKAD	Rp 185.874.900	89,82	
		100 Prosen	Hasil perhitungan jumlah data pegawai yang dimutakhirkan dibagi dengan jumlah data seluruh pegawai dikali 100%	100	100	Sangat Baik

(Sumber: SIMONEK Kabupaten Cirebon)

Berdasarkan data pada tabel 3.2, terlihat bahwa capaian sasaran kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian dengan indikator Indeks kepuasan layanan kepegawaian tercapai sebesar 100,09% (Tercapai), sasaran meningkatkan aparatur yang profesional dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN tercapai sebesar 108,13% (Tercapai) dan sasaran meningkatkan sistem informasi ASN yang akurat, transparan dan akuntabel dengan indikator Prosentase jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses tercapai sebesar 100% (Tercapai). Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.1. Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian

Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian diukur dengan indikator dan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Rumus
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan kepegawaian

Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian diukur dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Kepegawaian. Sumber data diolah dari hasil nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun atas kinerja pelayanan kepegawaian.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Indikator Sasaran	2023		2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap target 2024 (%)
		Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	92.08	100.08	95.00	95.09	100.09	95.00	100.09

Analisis ketercapaian Sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 95.09, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100.09% (terlampau).
- b. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian adalah sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 meningkat sebesar 0.01%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 merupakan akhir dari RPJMD sebesar 100.09% (terlampau).

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintah	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
	1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100
	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	100
	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100

			pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	1.3.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100
	1.3.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100
	1.3.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100
	1.4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
	1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100

	1.5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	100
	1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100
	1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100
Program Kepegawaian Daerah	2.1	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Regulasi	1 Regulasi	100
	2.1.1	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	2.1.2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	100
	2.1.3	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	100
	2.2	Mutasi dan promosi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	2.2.1	Pengelolaan	Jumlah Pengelolaan	14	14	100

		Kenaikan Pangkat ASN	Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Dokumen	
	2.3	Pengembangan kompetensi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	2.3.1	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	2.4	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	2.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	73 Orang	73 Orang	100
	2.4.3	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Sumber : Laporan Evaluasi TW. IV Tahun 2024

Capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Program Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2) Terlaksananya pemberian gaji
- 3) Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan kepegawaian
- 5) Sudah selesainya pembangunan Rehabilitasi Mushola
- 6) Sudah diselesaikannya pemasangan Video Wall di Aula BKPSDM
- 7) Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

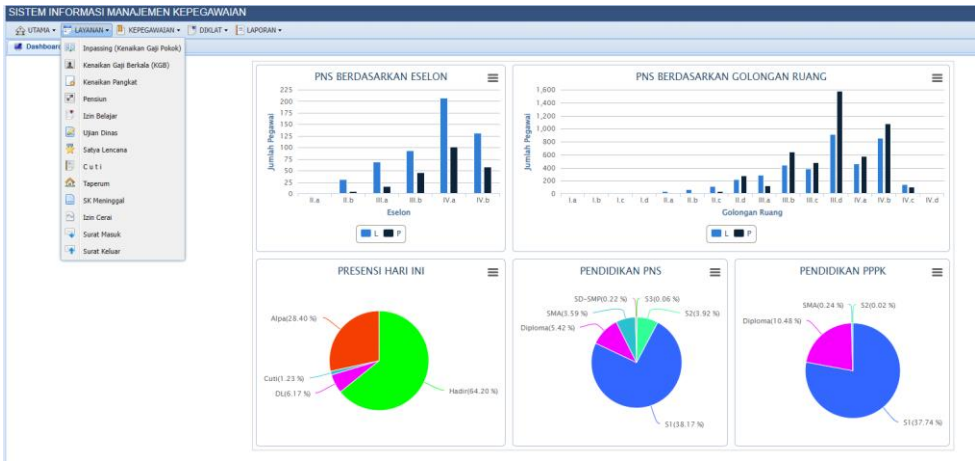
Pelayanan administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah jumlah permintaan pelayanan kepegawaian pada tahun 2024 sebanyak 7.415

layanan/pegawai, dengan penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu sejumlah 7.415 layanan/pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Izin Cuti	=	1.884 Orang
Rekomendasi TPP	=	1.037
Izin Belajar	=	188 Orang
Kenaikan Gaji Berkala	=	2.695 Orang
Karis / Karsu	=	88 Orang
Pemberkasan Pensiun	=	669 Orang
Izin Cerai	=	3 Orang
Kenaikan Pangkat	=	851 Orang

Layanan administrasi kepegawaian di Kabupaten Cirebon sudah memanfaatkan teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengajuan usulan layanan kepegawaian, yang ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.1 Layanan Kepegawaian melalui SIMPEG



Pada Tahun 2024 sebagai salah satu komitmen BKPSDM dalam memberikan pelayanan kepegawaian yang optimal, berintegritas, Transparan dan Akuntabel maka pada 7 Oktober 2024 BKPSDM melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BKPSDM yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Pj. Bupati Cirebon.



Pencanangan Zona Integritas (7 Oktober 2024)

Serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan sertifikasi layanan kepegawaian dengan PT.TUV Rheinland.



Resertifikasi ISO 9001:2015

b. Capaian Program Kepegawaian Daerah

Indikator Program Kepegawaian Daerah Pada Sasaran ke-1 yaitu Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya dan Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP.

1. Pemberian JKK dan JKM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang merupakan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedangkan Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian

bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Adanya program JKK dan JKM tersebut dapat membantu pegawai ASN merasa aman serta nyaman dalam setiap langkah pekerjaannya. Jumlah JKK dan JKM yang diproses untuk pegawai sebanyak 5 buah.

2. Fasilitas KORPRI

Pada tahun 2024 kegiatan utama Fasilitas KORPRI yaitu menyiapkan bantuan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah memasuki masa Purna Bhakti dan memberikan piagam penghargaan bagi para Purna Bhakti Pegawai Negeri Sipil. Kemudian memfasilitasi konsultasi bagi para Purna Bhakti Pegawai Negeri Sipil yang akan mencairkan Tabungan Perumahan Rakyat. Kegiatan rutin yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu koordinasi baik koordinasi kesamping dengan kecamatan, perangkat daerah lainnya juga koordinasi ke atas dengan pengurus Korpri Pusat dan Tapera Pusat di Jakarta serta pihak perbankan yang ditunjuk untuk mengelola iuran keanggotaan Korpri untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan kegiatan bantuan kesejahteraan bagi yang sudah memasuki masa Purna Bhakti sebanyak 659 orang.

Capaian indikator ini pada Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Capaian Indikator dari Program Kepegawaian pada Sasaran ke-1 dapat dilihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada gambar berikut :



Penyerahan SK Pensiun (31 Oktober 2024)



HUT KORPRI (Fasilitasi Korpri) Tanggal 29 November 2024



Pengukuhan Anggota Korpri Tanggal 6 Maret 2024

Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK
- b. sarana prasarana yang memadai seperti penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD Tahun 2024, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.
- d. Koordinasi internal berjalan dengan baik
- e. Koordinasi dengan pihak penyelia berjalan dengan baik
- f. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik

Faktor Penghambat

- a. masih terdapat urusan administrasi layanan pegawai yang menggunakan sistem manual (bukti cetak/hardfile).
- b. penggunaan SIMPEG yang belum optimal dikarenakan adanya pengembangan sistem sehingga dalam penginputan data harus dua kali karena ada 2 Aplikasi SIMPEG yang digunakan.

3.2. Sasaran 2 Meningkatnya Aparatur yang Profesional

Kinerja Sasaran Meningkatnya Aparatur yang Profesional diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan indikator dan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Rumus
1	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN oleh BKN

Kinerja Sasaran Meningkatnya Aparatur yang Profesional diukur dengan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN oleh BKN. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indeks profesionalitas ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Tujuan dari Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu Memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Adapun manfaat dari pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ini antara lain :

- a. Bagi pegawai : Digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
- b. Bagi Instansi Pemerintah : Digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.

- c. Bagi Masyarakat : Digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik

Sumber data diolah dari hasil penilaian BKN pada Tahun 2024 untuk Indeks Profesionalitas ASN yang diukur dari dimensi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memperoleh nilai 81.10 point.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Indikator Sasaran	2023		2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap target 2024 (%)
		Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Profesionalitas ASN	79.95	108.04	75.00	81.10	108.13	75.00	108.13

Analisis ketercapaian Sasaran 2, Meningkatnya Aparatur yang Profesional adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2024 dengan nilai 81.10 naik 6,1 dari target 75,00, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 108.13% (terlampau).
- b. Sasaran Meningkatnya Aparatur yang Profesional adalah sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar 0.09%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 merupakan akhir dari RPJMD sebesar 108.13% (terlampau).

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan meningkatkan aparatur yang profesional didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Program Kepegawaian Daerah	1.1	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Regulasi	1 Regulasi	100

	1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1.2	Mutasi dan promosi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	1.2.1	Pengelolaan Mutasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1.2	Pengembangan kompetensi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	1.2.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	250	15.399	6159.60
	1.2.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1.2.3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1.2.4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	500	100	20.00
	1.2.5	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100	304	304.00
	1.3	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100

	1.3.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 Orang	9 Orang	100
	1.3.2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	100
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	110 Orang	140 Orang	127.27
	2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100
	2.2.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100

		serta Jabatan Fungsional				
	2.2.2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	100

Sumber : Laporan Evaluasi TW. IV Tahun 2024

Capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Program Kepegawaian Daerah

1. Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

1) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan pengawas dan tunjangan jabatan fungsional. Perhitungan TPP diatur oleh Peraturan Bupati Cirebon Nomor 172 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2) Pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya

Bentuk perhatian Pemerintah terhadap ASN yang memiliki loyalitas, kinerja dan prestasi yang baik diwujudkan dengan pemberian berbagai penghargaan, salah satunya adalah dengan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Negara terhadap PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lainnya. Jumlah Satyalancana Karya Satya yang terealisasi sebanyak 174 buah.

3) Penghargaan PNS Berprestasi

Pemberian penghargaan kepada ASN adalah salah satu bentuk pengakuan dan apresiasi atas prestasi ASN. Tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Cirebon akan

menyelenggarakan kompetisi ASN Berprestasi yang merupakan pemberian apresiasi kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon atas prestasi kerja yang dilakukan oleh ASN karena dinilai telah memberikan inovasi/karya/ide baru yang bermanfaat bagi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kompetisi ASN Berprestasi ini memiliki tujuan untuk (1) memberikan motivasi kepada ASN untuk berperan secara aktif dalam pembangunan daerah, (2) memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja dan (3) mengembangkan sikap keteladanan bagi ASN dan mendorong semangat untuk menciptakan karya terbaik bagi kemajuan Daerah. Dasar pemberian penghargaan ini telah tertuang pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian.



Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi 17 Agustus 2024

2. Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa pengembangan karier PNS dalam JF, Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF, dan pengangkatan PNS dalam JF dilakukan melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, pengangkatan penyesuaian/ inpassing, dan promosi. Dalam Pengembangan karier ASN sebagai bagian proses manajemen ASN yang menggambarkan pergerakan posisi atau Jabatan ASN menuju peningkatan dan kemajuan pengabdianannya di Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta sejak awal menjadi CASN hingga pemberhentian, yang digambarkan dalam pola karier ASN berdasarkan kualifikasi, kinerja, kompetensi, integritas, dan moralitas.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan Manajemen Kepegawaian untuk kegiatan rekrutmen CASN, mutasi dan promosi, Pengangkatan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional. Pemenuhan Manajemen Kepegawaian tersebut dijelaskan pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Pemenuhan penataan ASN Tahun 2024

NO	Pemenuhan Penataan ASN	Jumlah Pegawai
1	Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	1 Orang
2	Pelantikan dalam Jabatan Administrasi	25 Orang
3	Pelantikan dalam Jabatan Pengawas	39 Orang
4	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional (JF)	87 Orang
5	Penerimaan CPNS sesuai Formasi	60 Orang
6	Penerimaan PPPK Tahap I	1.737 Orang

Sumber : Bidang PKK dan PPI Tahun 2024

Kegiatan pentaan ASN di Kabupaten Cirebon di tunjukkan pada gambar berikut :



Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JPT Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. (8 Maret 2024)




Rangkaian seleksi kompetensi CPNS dan PPPK Bulan Agustus – Desember 2024

3. Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja pegawai salah satunya terdiri dari Penilaian Kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara sehingga mulai tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon Resmi Menggunakan E-Kinerja BKN untuk pelaksanaan pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pegawai.

Aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam pengelompokan dan kompilasi data kinerja. Untuk penilaian kinerja pegawai menggunakan E-Kinerja BKN ditunjukan pada gambar berikut.

Gambar 3.3 Aplikasi E-Kinerja BKN



Buku Panduan

MAIN MENU

Profil

SKP

Tim Kerja

Angka Kredit

Persetujuan PAK

Rekap Keberatan

DASHBOARD

Dashboard

Penilaian SKP Pegawai

Jika Periode Penilaian belum tercantum, silahkan klik tombol TAMBAH PERIODE PENILAIAN dan pilih periode yang ingin ditambahkan.

Nilai Capaian Organisasi akan menggunakan Nilai Capaian dari Unit Kerja Induk, kecuali Unit Kerja mempunyai Capaian Organisasi sendiri.

TAMBAH PERIODE PENILAIAN

HAPUS PERIODE DUPLIKAT

Periode SKP

1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

Jabatan

SEKRETARIS

Unit Kerja

SEKRETARIAT

Struktur UNOP

Unit Kerja Induk

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ID : 8a648a7596c42ed0c597d6f0af7b7e

ID : 8a648a7596c42ed0c597d6f0af7b7e

Pelaksanaan Kinerja

Pemantauan dan Evaluasi

Hasil Kerja	Perilaku Kerja	Nilai SKP	Capaian Organisasi	Aksi
<div>1 Januari s.d 31 Januari 2025</div> <div>1 Januari 2025 s/d 31 Januari 2025</div> <div>Batas : 7 Februari 2025</div>				
<div>Atasan</div> <div>HENDRA NIRMALA</div> <div>Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</div> <div>Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</div>				
<div>Cetak Form Penilaian</div> <div>Cetak Dokumen Evaluasi Kinerja</div>				
<div>Rencana Aksi</div> <div>Pengisian BUKU Dukung dan Lihat Hasil</div> <div>Feedback Perilaku</div>				

Proses pelaksanaan perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, mutasi, disiplin dan pensiun di Kabupaten Cirebon telah menggunakan merit sistem sebagai salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama. Hasil dari penilaian Indeks Merit Sistem di Kabupaten Cirebon tahun 2024 telah mendapatkan nilai **Baik** dengan **skor 289** dari Badan Kepegawaian Negara dan tahun ini adalah tahun ke tiga atas penilaian Indeks Merit Sistem di Kabupaten Cirebon. pemberian penghargaan tersebut dilihat pada gambar berikut.

LKJIP BKPSDM TAHUN 2024

46



Anugrah Meritokrasi 2024

b. Capaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Tujuan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang Aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan, karena diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, khususnya untuk ASN agar dicapainya kompetensi tertentu.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan diklat menggunakan data dari dokumen HCDP (*Human Capital Development Plan*) serta menggunakan kurikulum kediklatan yang telah disusun agar proses pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun 2024 target ASN yang akan di diklatkan sebanyak 250 orang sedangkan peserta diklat jauh melebihi target yaitu sebesar 15.117 orang. Kenaikan jumlah peserta yang cukup signifikan terjadi karena adanya penyelenggaraan diklat Manajemen Kepegawaian yang menggunakan metode daring sehingga dapat diikuti oleh semua pegawai karena bersifat umum dan adanya diklat GTA (*Government Transformation Academy*) bekerja sama dengan Dinas Kominfo yang

dapat diikuti oleh semua pegawai yang mendaftarkan diri. Peserta yang mengikuti diklat dengan rincian sebagai berikut :

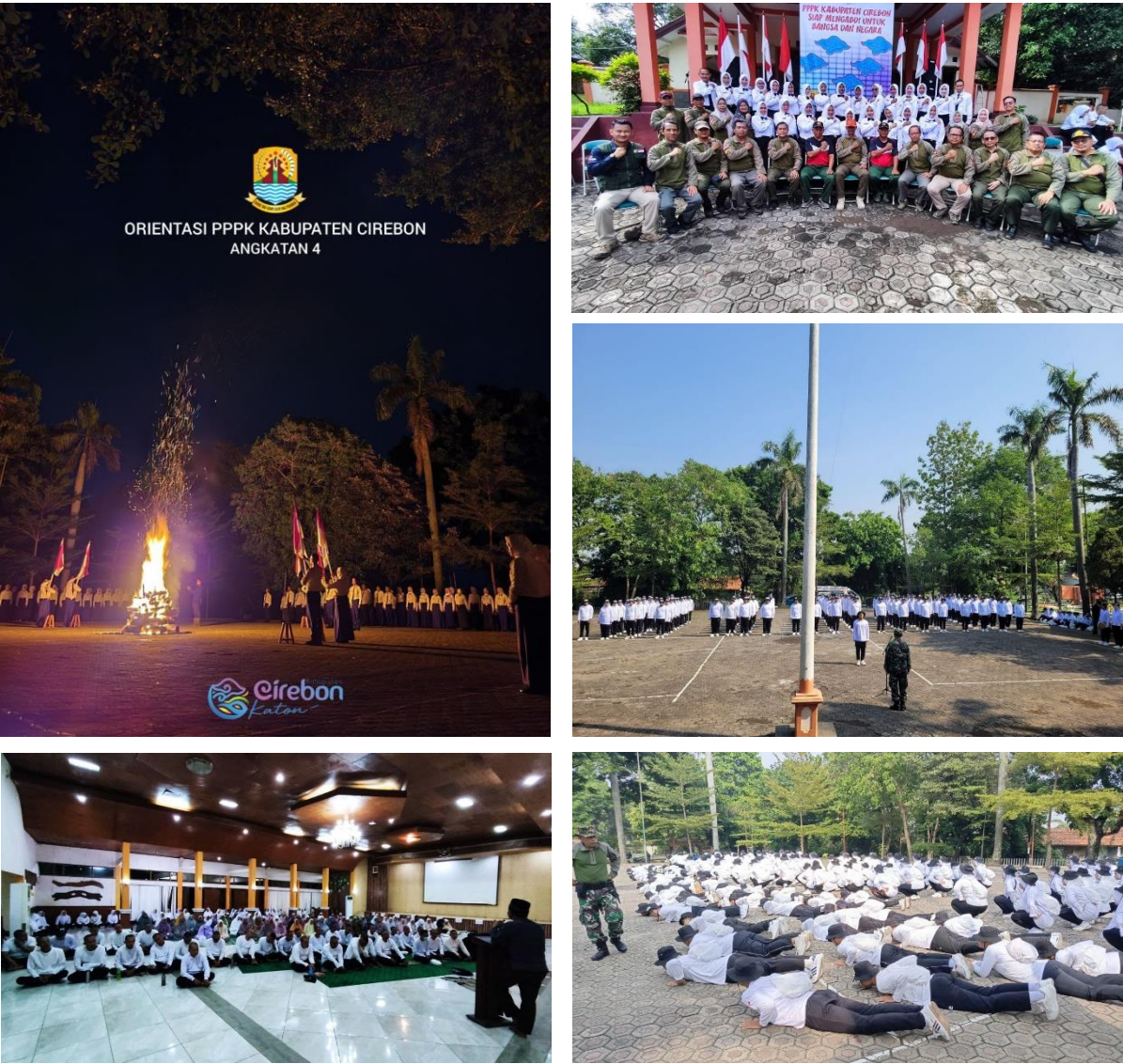
Tabel 3.10 Kediklatan Pegawai Tahun 2024

No	Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN mengikuti diklat (orang)
1	Pengiriman dan Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Fungsional	12.064
2	Pengiriman Pelatihan Dasar	3.009
3	Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan JPT dan Administrator	26
4	Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	44
	Jumlah	15.117

(Sumber: BIDANG PKA BKPSDM Kabupaten Cirebon).

Dokumentasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai di Kabupaten Cirebon ditunjukkan pada gambar berikut :

Orientasi PPPK





Launching Corporate University ASN

Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK
- b. sarana prasarana yang memadai seperti penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD Tahun 2024, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.
- d. Koordinasi internal berjalan dengan baik
- e. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik

Faktor Penghambat

- a. Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan dimana proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.
- b. prosedur harus mengirimkan data rekomendasi terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN yang mana proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

- c. Penyusunan persentase pemenuhan kebutuhan dan penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun yang masih dilakukan secara manual melalui Microsoft Excel sehingga membutuhkan banyak waktu dan Sumber Daya Manusia.
- d. Adanya pengalihan penerbitan karis/karsu yang sudah beralih ke sistem dan seluruh pegawai bisa melakukan cetak secara mandiri, sehingga dengan adanya peralihan tersebut anggaran pengelolaan data kepegawaian tidak terserap dengan baik.
- e. Penataan tenaga honorer, dengan telah diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 100.3.4.2/5279/BKPSDM tanggal 30 September 2024 tentang Larangan Pengangkatan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; Pada Tahun 2024 telah melaksanakan penataan Tenaga Non ASN dengan membuka Formasi sejumlah 2.040 Formasi PPPK. Pada Tahap I yang dinyatakan lulus sebanyak 1.737. Sedangkan Pelamar yang tidak lulus seleksi pada tahap I sebanyak 1.656 dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu dan pada Tahun 2025 jumlah Pelamar pada Tahap II sebanyak 3.240, yang akan mengisi kekosongan Formasi PPPK sebanyak 303. Akan tetapi masih belum jelasnya kebijakan mengenai PPPK Paruh Waktu.
- f. masih terdapat urusan administrasi layanan pegawai yang menggunakan sistem manual (bukti cetak/hardfile), penggunaan SIMPEG yang belum optimal dikarenakan adanya pengembangan sistem sehingga dalam penginputan data harus dua kali karena ada 2 Aplikasi SIMPEG yang digunakan.
- g. pemberian TPP bagi pegawai telah dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 172 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam pemberian besaran TPP kepada seluruh pegawai dengan indikator penilaian disiplin, pengisian kinerja, absensi dan Pelaporan SPT. Akan tetapi dalam pemberian TPP setiap pegawai masih diberikan secara full sehingga perlu dilakukan penambahan klausul dan penambahan indikator pengukuran penerimaan TPP bagi Seluruh pegawai.
- h. penggunaan SIMPEG yang belum optimal dikarenakan adanya pengembangan sistem sehingga dalam penginputan data harus dua kali karena ada 2 Aplikasi SIMPEG yang digunakan.
- i. kuota terbatas bagi peserta diklat penjenjangan seperti Latsar dan Diklat kepemimpinan bagi administrator (PKA).

- j. Adanya perubahan kebijakan penghapusan KASN yang tugas dan fungsinya di ambil alih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara, sehingga perolehan nilai Sistem Merit mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai nilai 298,5 menjadi 289 di tahun 2024.

3.3 Sasaran 3 Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel

Kinerja Sasaran Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel diukur dengan Prosentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses diukur Persentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses diukur dengan indikator dan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Rumus
1	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	Prosentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses	Prosentase <i>update</i> data pegawai yang mutakhir dan akurat dan mudah diakses di SIMPEG pada Akhir Tahun

Kinerja Sasaran Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel diukur dengan Prosentase *update* data pegawai yang mutakhir dan akurat dan mudah diakses di SIMPEG pada Akhir Tahun.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Indikator Sasaran	2023		2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap target 2024 (%)
		Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	99.72	100.02	100	100	100	100	100

Analisis ketercapaian Sasaran 3, Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel diukur dengan Persentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses pada Tahun 2024 dengan capaian 100%.
- b. Sasaran Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel diukur dengan Persentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses adalah sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 meningkat sebesar 0.28%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 merupakan akhir dari RPJMD sebesar 100% (terlampai).

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan meningkatkan Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Program Kepegawaian Daerah	1.1	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Regulasi	1 Regulasi	100
	1.1.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1.1.2	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	100

Sumber : Laporan Evaluasi TW. IV Tahun 2024

Capaian tersebut didukung dari :

- a. Data Kepegawaian

Sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu persamaan langkah dan keterbaharuan pemahaman regulasi agar tercapai sinergi, kolaborasi dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Cirebon. Tujuan dari diadakannya Rapat Koordinasi ini adalah untuk kerjasama dan penyamaan persepsi antar perangkat daerah dalam rangka penyelesaian urusan kepegawaian yang efektif.

Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK
- b. sarana prasarana yang memadai seperti penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD Tahun 2024, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.
- d. Koordinasi internal berjalan dengan baik
- e. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik

Faktor Penghambat

- a. penggunaan SIMPEG yang belum optimal dikarenakan adanya pengembangan sistem sehingga dalam penginputan data harus dua kali karena ada 2 Aplikasi SIMPEG yang digunakan.
- b. Data kepegawaian merupakan data dinamis yang bergerak terus menerus,

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Tahun 2019-2024 diukur dengan 3 (tiga) indikator Sasaran, yaitu :

- Sasaran 1.** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian diukur dengan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian;
- Sasaran 2.** Meningkatnya Aparatur yang Profesional diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN dan;
- Sasaran 3.** Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel diukur dengan Persentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Indikator Sasaran	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		Tar get	Rea lisa si	% tingkat capaian	Targ et	Real isasi	% tingkat capaian	Targ et	Realis asi	% tingkat capaian	Targe t	Realis asi	% tingkat capaian	Targ et	Realis asi	% tingkat capaian	Targ et	Realis asi	% tingkat capaian
1	2	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	7	8	9
1	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	N/A	N/A	N/A	85,00	86,00	101,18	87,00	88,03	101,18	89,00	90,30	101,46	91,00	92,08	101,19	93,00	95,09	100,09
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian (Indeks kepuasan layanan kepegawaian)	N/A	N/A	N/A	86,00	86,00	100,00	88,00	88,03	100,03	90,00	90,30	100,33	92,00	92,08	100,09	95,00	95,09	100,09
1.2	Meningkatnya Aparatur yang Profesional (Indeks Profesionalitas ASN)	N/A	N/A	N/A	65,00	32,00	49,23	71,00	39,79	56,04	72,00	50,26	69,81	74,00	79,94	108,03	75,00	81,10	108,13
1.3	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel (Prosentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses)	N/A	N/A	N/A	98,80	98,80	100,00	99,10	99,10	100,00	94,40	94,40	100,00	99,70	99,72	100,02	100	100	100

(Sumber: SIMONEK Kabupaten Cirebon).

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra 2019-2024.

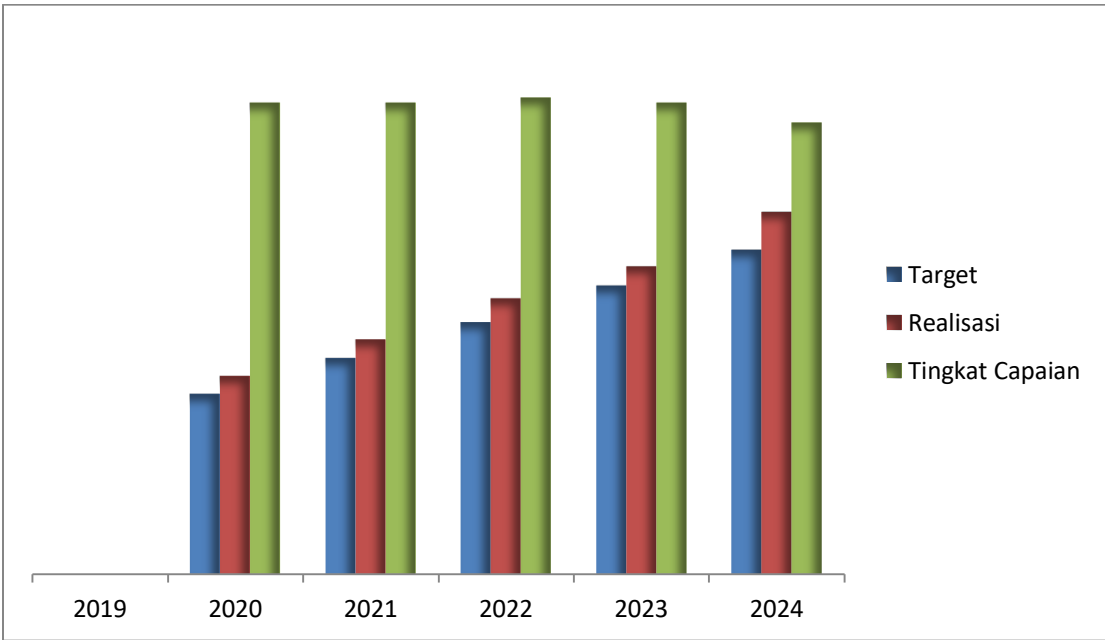
Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.1 berikut tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis

No.	Tahun	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Tingkat capaian (%)
1.	2019	N/A	N/A	N/A
2.	2020	85	86	101,18
3.	2021	87	88,03	101,18
4.	2022	89	90,30	101,46
5.	2023	91	92,08	101,19
6.	2024	93	95,09	100.09

(Sumber : PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon)

Gambar 3.3 Perbandingan capaian indikator sasaran strategis



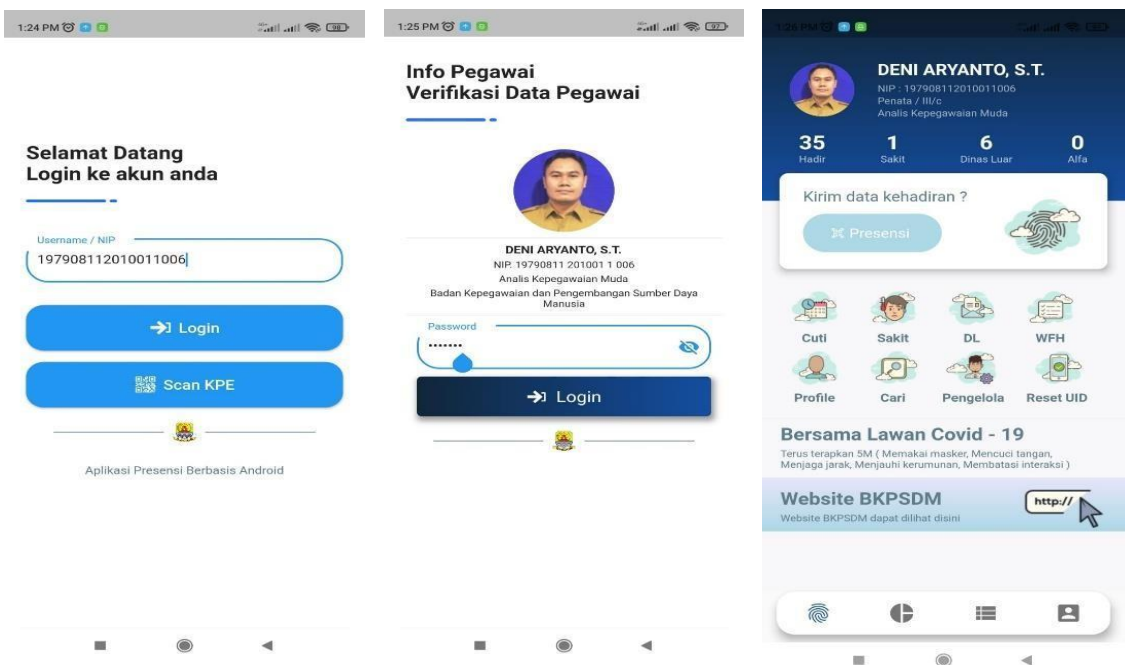
3.6 Dukungan Inovasi Dalam Pencapaian Kinerja

Pengertian inovasi adalah berbagai kegiatan atau aktivitas penelitian, pengembangan serta atau perekayasaan yang dilakukan untuk dapat pengembangan penerapan praktis nilai serta konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau proses produksinya. Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan merintis serta menginisiasi inovasi ASN Unggul yaitu strategi membangun keunggulan sumber daya manusia aparatur melalui manajemen talenta integratif pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tujuan ASN-Unggul adalah untuk membangun keunggulan sumber daya manusia aparatur melalui sebuah proses tata kelola yang transparan, objektif, dan akuntabel berpegang pada prinsip-prinsip sistem merit, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ASN untuk mengembangkan potensinya melalui ekosistem yang menantang dan kekinian, sebagai upaya mempersiapkan calon pemimpin unggul di masa depan (*future leaders*).

Beberapa Inovasi BKPSDM Kabupaten Cirebon :

1. **Aplikasi M-PRASS (Mobile Presensi ASN (Android))** adalah Inovasi BKPSDM dalam rangka meningkatkan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon maka dibangunlah sebuah Aplikasi perekaman absensi menggunakan aplikasi berbasis Android yang diberi nama Aplikasi M-Prass dapat diunduh di Google Play Store (Presensi ASN Cirebon). Tampilan M-PRASS sebagai berikut :

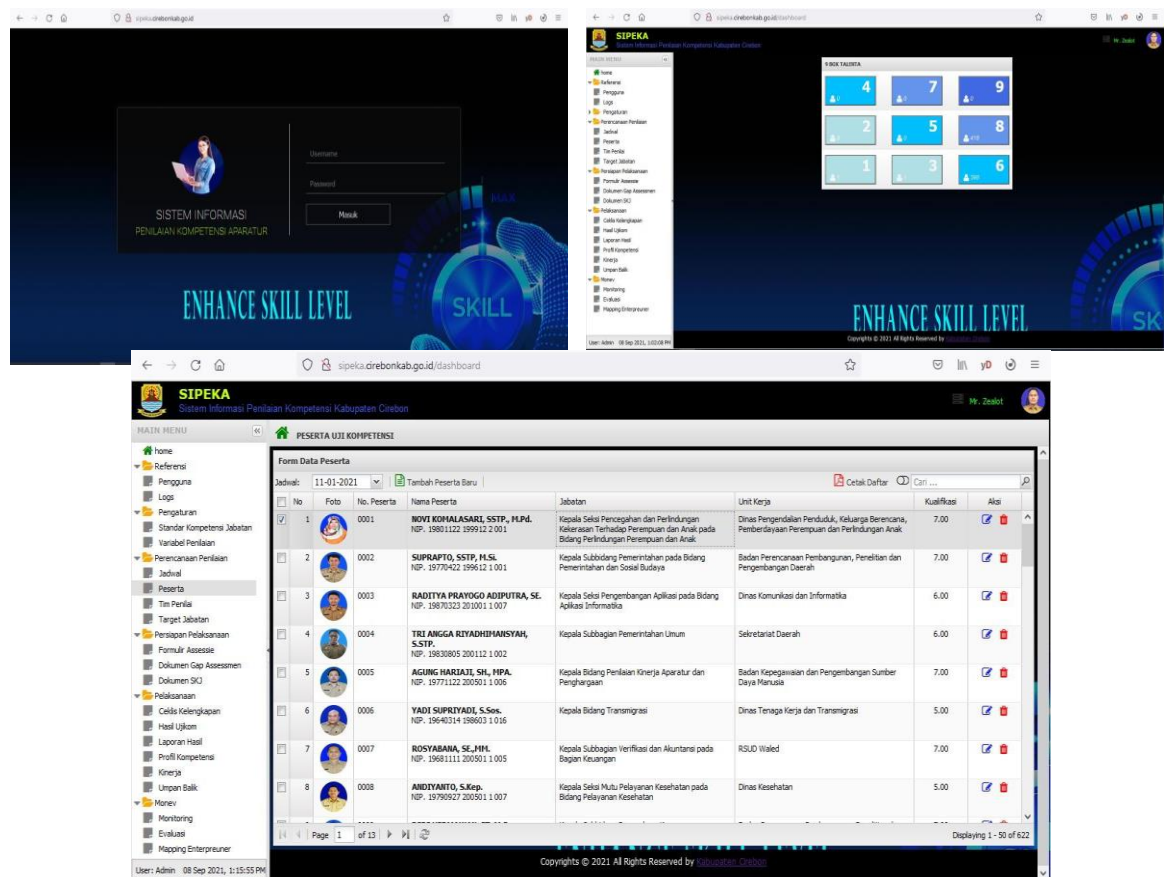


2. **Ruang Assessment Center (CAT)**, adalah sebuah Inovasi di BKPSDM untuk membangun ruangan yang disiapkan untuk melakukan assessment/uji kompetensi bagi PNS Kabupaten Cirebon. Ruang CAT sejauh ini sudah memiliki 75 unit komputer.



Ruang CAT

3. **Aplikasi SIPEKA (Sistem Informasi Penilaian Kompetensi Aparatur),** Sistem yang dibangun untuk menunjang penempatan ASN di Kabupaten Cirebon sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sistem ini dibangun untuk mengurangi mutasi/rotasi dengan pola spoil sistem. Aplikasi SIPEKA.



Tampilan Aplikasi SIPEKA <http://sipeka.cirebonkab.go.id>.

3.7 **Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran Perangkat Daerah dalam Pencapaian Sasaran**

BKPSDM Kabupaten Cirebon melaksanakan kolaborasi lintas sektor mendukung capaian kinerja instansi yakni kolaborasi pada sektor sosial, sektor fisik, sektor ekonomi, sekretariat daerah seperti: kolaborasi dengan BAPPELITBANGDA untuk perencanaan mitra sektor pemerintah, BKAD terkait anggaran, DISKOMINFO terkait pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, Bagian Organisasi untuk kebijakan strategis, Inspektorat untuk pengawasan internal, Bagian Kerjasama terkait kerjasama daerah, Bagian Hukum terkait penyusunan produk hukum dan bersama instansi di Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait program kepegawaian dan pengembangan SDM. untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan program maka BKPSDM Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan Instansi vertikal yaitu dengan BKN, KEMENPANRB dan KEMENDAGRI.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Anggaran BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, adalah sebesar Rp 24.086.761.300,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 23.210.703.300,- dan belanja modal sebesar Rp 876.058.000,-.

Jika dibagi pada masing-masing program dan Indikator Program, maka :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 18.471.534.500,-,
- 2. Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp 2.673.857.700,-, dan
- 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 2.941.369.100,-.

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran 2024

Uraian	Target	Realisasi	Sisa DPA (Rp.)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	(Rp.)	(Rp.)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.471.534.500	17.819.804. 286	621.175.598	96,47	3,53%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.144.500	115.001.140	5.143.360	95,72%	4,28%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.292.667.600	15.741.748.133	550.919.467	96,62%	3,38%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.346.337.500	1.343.402.300	2.935.200	99,78%	0,22%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.786.300	288.978.788	82.807.512	77,73%	22,27%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.598.600	330.673.925	9.924.675	97,09%	2,91%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.673.857.700	2.511.818.926	162.038.774	93,94%	6,06%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.074.005.500	959.335.314	114.670.186	89,32%	10,68%
Mutasi dan Promosi ASN	604.817.800	599.004.530	5.813.270	99,04%	0,96%
Pengembangan Kompetensi ASN	543.343.900	534.416.952	8.926.948	98,36%	1,64%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	451.690.500	419.062.130	32.628.370	92,78%	7,22%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.941.369.100	2.906.350.800	35.018.300	97,12%	2,88%
Pengembangan Kompetensi Teknis	134.757.000,00	133.482.000,00	1.275.000,00	99,05%	0,95%

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.806.612.100,00	2.772.868.800,00	33.743.300,00	98,80%	1,20%
Jumlah	24.086.761.300	23.237.974.012	848.787.288	96.48%	3,52%

Sumber: Realisasi Anggaran TW IV Tahun 2024

Dalam setiap penyusunan rencana aksi, perencanaan/penganggaran, data kinerja, evaluasi capaian kinerja sasaran program dan keuangan sebagai tindak lanjut dari desk timbal balik bersama mitra sektor pemerintah, terdapat dukungan dari Pimpinan BKPSDM Kabupaten Cirebon serta kerjasama yang baik dari bidang-bidang internal dan sekretariat sehingga tujuan organisasi dapat berhasil terlaksana dengan baik.

1. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Table 3.17 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan layanan kepegawaian (Nilai)	95.00	95.09	100.09	19.314.953.400	18.592.174.916	96.26	722.778.484
2	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	75.00	81.10	108.13	4.564.865.400	4.459.924.196	97.70	104.941.204
3	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	Prosentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses (%)	100	100	100	206.942.500	185.874.900	89.82	21.067.600

(Sumber: SIMONEK Kabupaten Cirebon)

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 24.086.761.300, terealisasi Rp. 23.237.974.012 atau 96.48% sehingga dapat dikatakan pengurangan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi	% Efisiensi
5. Belanja Daerah	24.086.761.300	23.237.974.012	848.787.288	96.35%	3,52%
5.1. Belanja Operasi	23.210.703.300	22.364.624.012	846.079.288	96,35%	3,65%
5.1.01. Belanja Pegawai	16.281.092.000	15.730.172.533	550.919.467	96,62%	3,38%
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa	6.929.611.300	6.634.451.479	295.159.821	95,74%	4,26%
5.2 Belanja Modal	876.058.000	873.350.000	2.708.000	99.69%	0,31%
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	876.058.000	873.350.000	2.708.000	99,69%	0,31%
Jumlah	24.086.761.300	23.237.974.012	848.787.288	96.48%	3,52%

Terdapat efisiensi Rp. 848.787.288 atau 3.52% yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan
- Efisiensi belanja barang dan jasa
- Efisiensi belanja modal peralatan dan mesin



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai misi ke empat Pemerintah Kabupaten Cirebon, sasaran strategis yang ditetapkan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian, Indeks Profesionalitas ASN dan Persentase Jumlah Data Pegawai yang Mutakhir dan Akurat serta Mudah Diakses. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian terealisasi sebesar 95,09 Nilai dari target sasaran sebesar 93,00 Nilai pada tahun 2024. Adapun tingkat capaian realisasi kinerja adalah sebesar 102,25% dan realisasi serapan anggaran sebesar 96,48%.

Faktor Penghambat dalam manajemen kepegawaian pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dinamika Perubahan Regulasi Kepegawaian yang sangat cepat;
2. *Minus Growth*, dimana jumlah pegawai pensiun lebih banyak dari pegawai masuk;
3. Masih adanya mismatch penempatan PNS dalam jabatan;
4. Alokasi dan distribusi ASN secara kuantitas dan kualitas masih belum seimbang dan merata;

4.2 Langkah Perbaikan

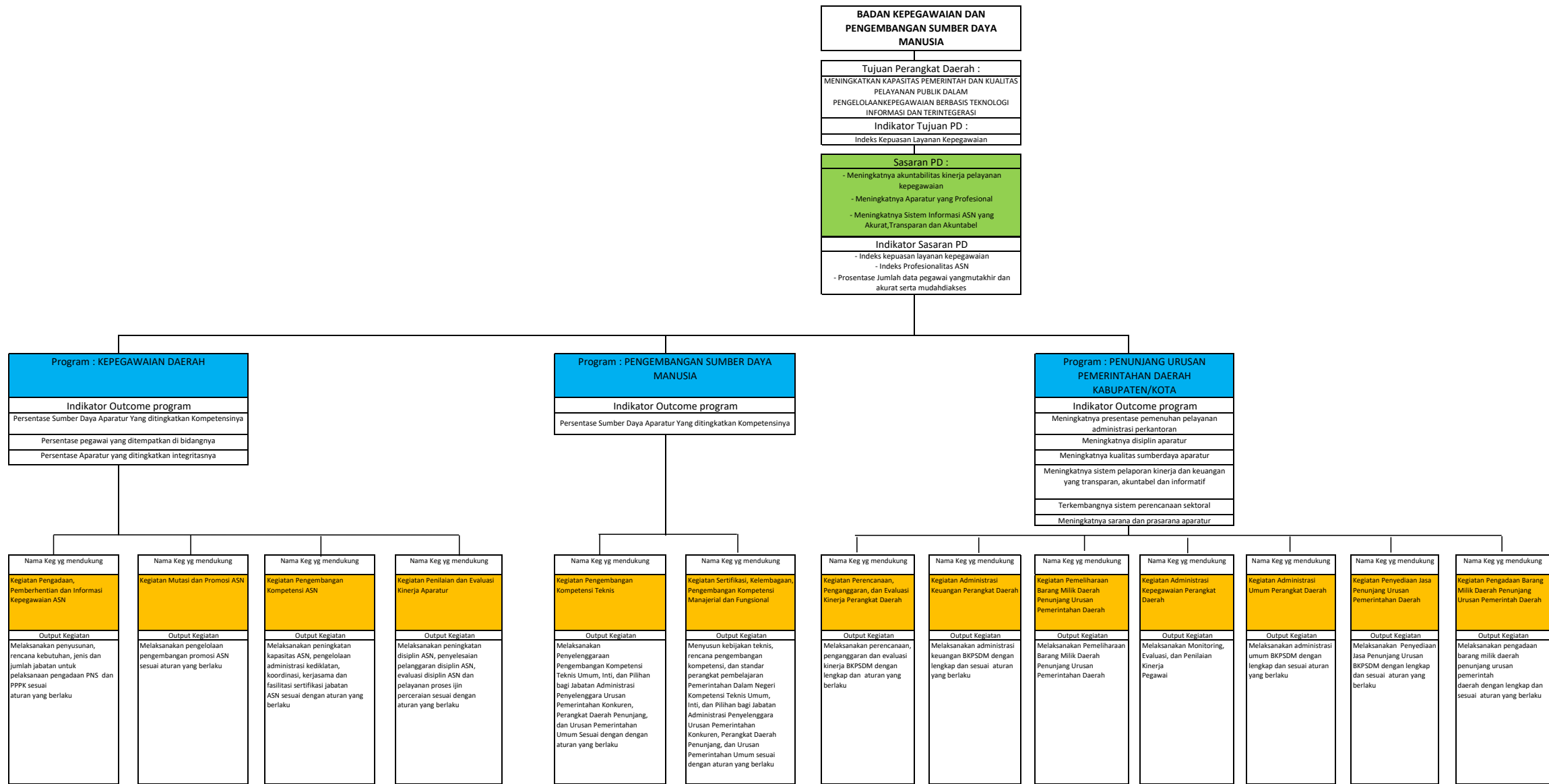
Sebagian besar pelaksanaan kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Cirebon bersifat fasilitasi dan pelaksanaannya bergantung pada kebijakan instansi pusat, lembaga penyelenggara diklat dan lembaga pembina lainnya. Adapun langkah-langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Melaksanakan redistribusi ASN dengan memperhatikan kualifikasi jabatan dan ketersediaan SDM;
2. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengembangan kompetensi ASN yang didukung dengan infrastruktur yang memadai;
3. Meningkatkan kesempatan bagi ASN dalam upaya pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang disediakan;
4. Rotasi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara periodik dan penempatan PNS dalam Jabatan sesuai manajemen talenta dan ketentuan yang berlaku.
5. Responsif/adaptif terhadap perubahan regulasi kepegawaian yang sangat cepat, menyusun regulasi daerah sebagai tindak lanjut dari dinamika perubahan regulasi kepegawaian pusat jika diperlukan;
6. Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur yang dimiliki dengan memperluas kompetensi ASN melalui sistem kerja.
7. Maksimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan kepegawaian, yang mana dalam perkembangannya layanan kepegawaian berbasis IT masih dibutuhkan penyempurnaan, terutama untuk layanan kepegawaian yang prosesnya masih menggunakan cara konvensional.
8. Pemenuhan SDM di setiap Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan redistribusi pegawai sesuai dengan beban kerja;
9. Mempercepat perbaikan dan update SIMPEG Kabupaten Cirebon.


LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Cashcading, Pohon Kinerja dan Crosscutting BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2024

CASCADING KINERJA RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019=2024



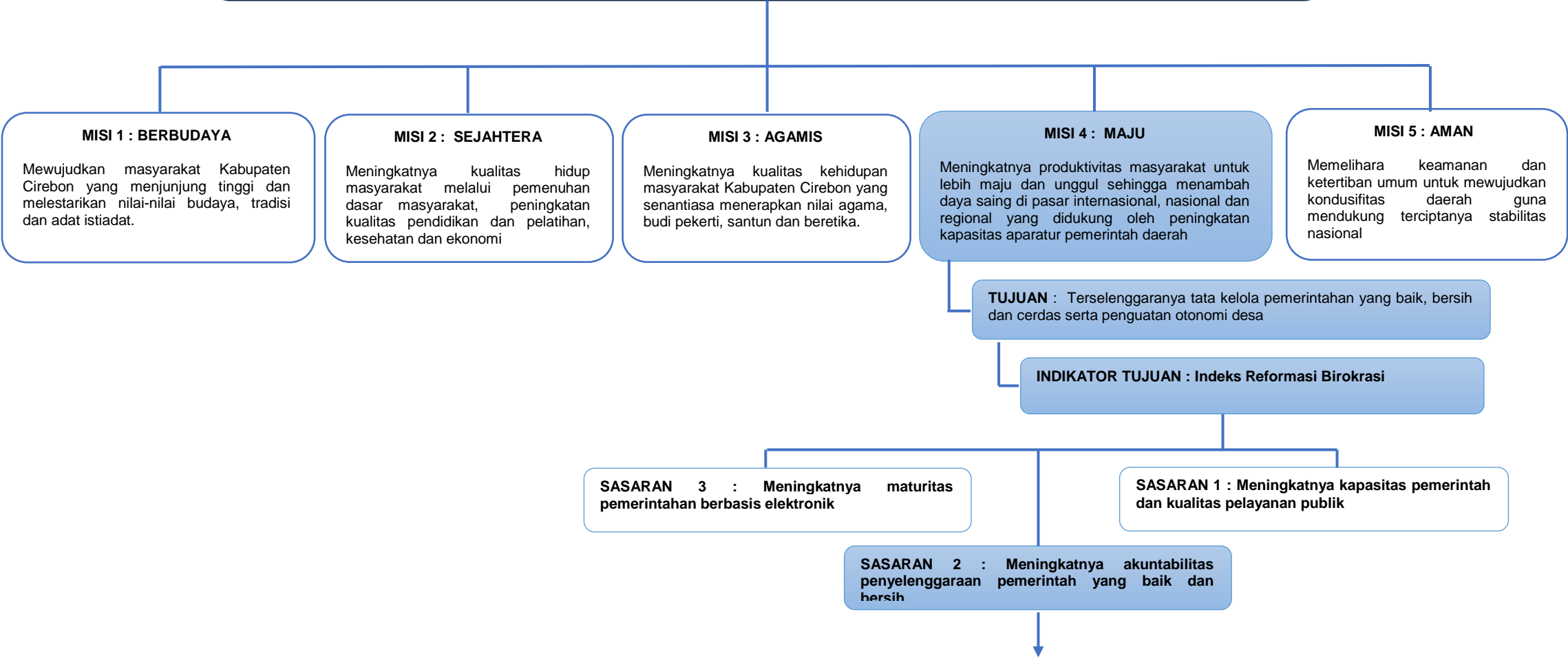
Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung	Nama Sub keg yang mendukung
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Penyelenggaraan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pembinaan Disiplin ASN		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	
Evaluasi Pemberhentian ASN		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Pengelolaan Data Kepegawaian		Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai							Penyediaan Bahan/Material		
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN							Fasilitasi Kunjungan Tamu		
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		

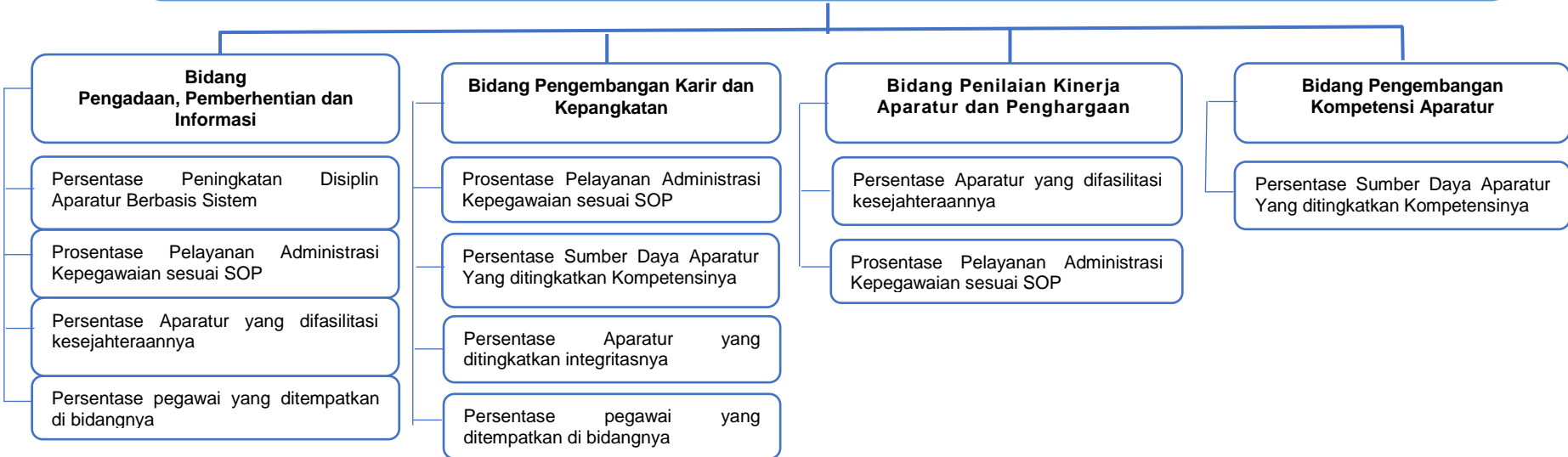
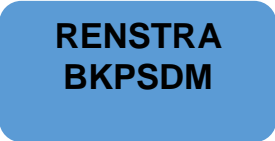
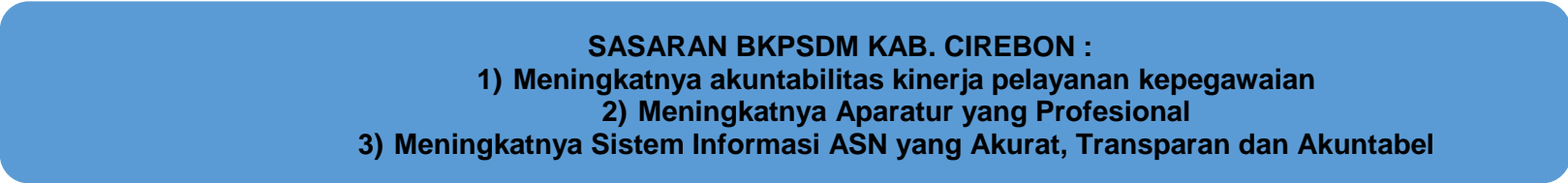
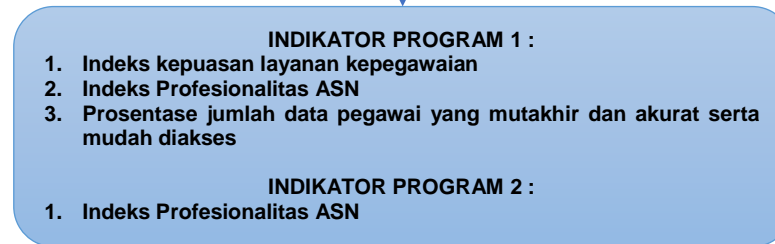
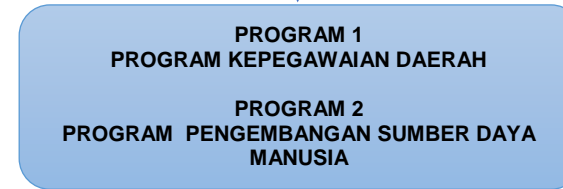
Mengetahui :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

POHON KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON

RPJMD

VISI KABUPATEN CIREBON 2019 – 2024
Untuk “ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN “
dicapai melalui 5 Misi :





**Mengetahui :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,**

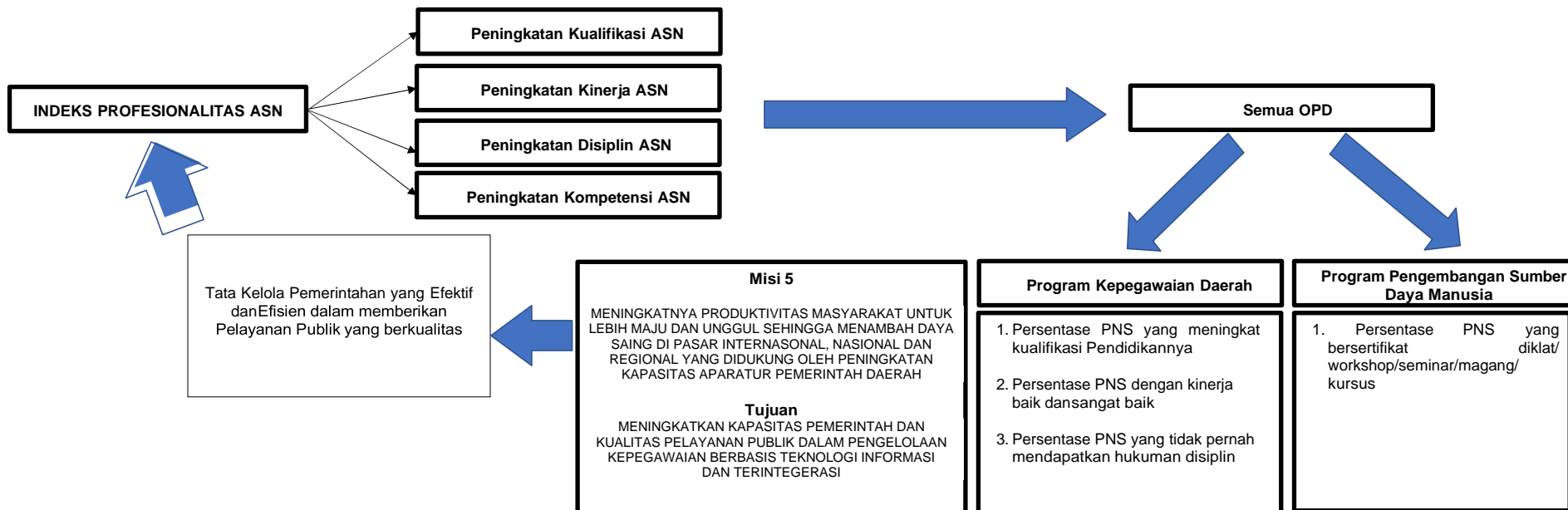


H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSN

CROSSCUTTING
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON**


H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Lampiran 2A. Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. H. IMRON, M.Ag



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN TERINTEGRASI	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	93 Poin
1.1.01.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan kepegawaian	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil survey kepuasan masyarakat (ASN)	95 Nilai
1.1.02.	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Non Kumulatif	Meningkat	Sistem Informasi Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN Tahun Sebelumnya	75 Prosen
1.1.03.	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	Prosentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses	$\frac{\text{Jumlah data pegawai yang dimutakhirkan}}{\text{Jumlah data pegawai seluruhnya}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	SIMPEG Kabupaten Cirebon	100 Prosen

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.587.870.500,00	Sumber Dana: BPHTB,BPHTB, DTU-DBH,BPHTB, DTU-DBH, Pjk Pen Jln,DTU-DAU, PAD,DTU-DBH
1.1.01.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	843.418.900,00	Sumber Dana: DTU-DBH
1.1.02.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.564.878.900,00	Sumber Dana: DTU-DBH,DTU-DBH, PBBP2
1.1.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	358.819.500,00	Sumber Dana: DTU-DBH
J U M L A H		19.354.987.800,00	

Pihak Kedua
BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, Januari 2024
Pihak Kesatu
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Lampiran 2B. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.

Jabatan

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama

: WAHYU MIJAYA

Jabatan

: Pj. BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sumber,

Oktober 2024

Pihak Kedua,


WAHYU MIJAYA

Pihak Kesatu,


H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.,
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Perkin Perubahan: 4.03.01.-Eselon II.b

simonek.cirebonkab.go.id



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN TERINTEGRASI	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	93 Poin	93 Poin
1.1.01.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan kepegawaian	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil survey kepuasan masyarakat (ASN)	95 Nilai	95 Nilai
1.1.02.	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Non Kumulatif	Meningkat	Sistem Informasi Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN Tahun Sebelumnya	75 Prosen	75 Prosen
1.1.03.	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel	Prosentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah diakses	$\frac{\text{Jumlah data pegawai yang dimutakhirkan}}{\text{Jumlah data pegawai seluruhnya}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	SIMPEG Kabupaten Cirebon	100 Prosen	100 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.587.870.500,00	18.471.534.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD
1.1.01.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	843.418.900,00	843.418.900,00	Sumber Dana: DTU-DBH
1.1.02.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.564.878.900,00	4.564.865.400,00	Sumber Dana: DTU-DBH
1.1.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	358.819.500,00	206.942.500,00	Sumber Dana: DTU-DBH
J U M L A H		19.354.987.800,00	24.086.761.300,00	

Pihak Kedua
Pj. BUPATI CIREBON,


WARYU MIJAYA

Sumber, Oktober 2024
Pihak Kesatu
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,


H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN / KOTA
KABUPATEN CIREBON
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024

- Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:
- 1. Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel 100 Prosen
 - 2. Meningkatnya Aparatur yang Profesional 75 Prosen
 - 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian 95 Nilai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPd Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15		
	5.03. KEPEGAWAIAN																										
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	10.499.712.972	100	740.244.039	100	1.711.917.900	25	177.977.539	25	416.694.990	75	697.813.018	100	1.626.175.188	100	1.626.175.188	100	4.683.577.778	100	44.61	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Meningkatnya disiplin aparatur, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	57.189.500.720	100	13.627.702.635	100	16.281.092.000	25	3.809.973.266	25	8.347.206.475	75	12.393.966.332	100	15.730.172.533	100	15.730.172.533	100	50.846.516.772	100	88.91	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	1.154.363.025	100	74.412.000	100	103.226.000	0	0	0	1.467.000	93.73	33.625.000	95.09	98.082.640	95.09	98.082.640	100	369.638.540	100	32.02	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	394.348.791	100	16.456.300	100	16.306.600	25	6.536.700	25	11.267.700	75	16.306.600	100	16.306.600	100	16.306.600	100	89.297.600	100	22.64	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Terkembangnya sistem perencanaan sektoral, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	173.368.080	100	11.850.000	100	12.187.500	0	4.950.000	0	7.185.000	100	12.187.500	100	12.187.500	100	12.187.500	100	64.668.400	100	37.30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	16.148.504.673	100	409.862.488	100	346.804.500	25	38.346.250	25	80.338.500	75	145.324.350	100	336.879.825	100	336.879.825	100	2.678.156.455	100	16.58	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		5.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	310.832.875	1	0	1	120.144.500	0	4.950.000	0	13.383.000	0	50.543.500	1	115.001.140	1	115.001.140	1	469.491.940	25	151.04			
		5.03.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah , (Satuan: Dokumen)	3	53.368.080		0	3	12.187.500	0	4.950.000	1	7.185.000	3	12.187.500	3	12.187.500	3	12.187.500	3	12.187.500	100	22.84	SEKRETARIAT BKPSDM		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RPKD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15		
		5.03.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan: Laporan)	2	23.910.451		0	2	4.731.000	0	0	2	4.731.000	2	4.731.000	2	4.731.000	2	4.731.000	2	4.731.000	100	19.79	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: Laporan)	8	233.554.344		0	8	103.226.000	0	0	2	1.467.000	6	33.625.000	8	98.082.640	8	98.082.640	8	98.082.640	100	42	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	12.564.828.120	1	0	1	16.292.667.600	0	3.816.509.966	0	8.353.743.175	0	12.405.541.932	1	15.741.748.133	1	15.741.748.133	1	50.844.572.372	25	404.66			
		5.03.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang/bulan)	12	12.503.000.000		0	12	16.281.092.000	3	3.809.973.266	3	8.347.206.475	9	12.393.966.332	12	15.730.172.533	12	15.730.172.533	12	15.730.172.533	100	125.81	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		5.03.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan)	1	19.602.659		0	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	100	33.35	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, (Satuan: Laporan)	13	42.225.461		0	13	5.038.900	0	0	0	0	10	5.038.900	13	5.038.900	13	5.038.900	13	5.038.900	100	11.93	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	1.682.962.432	1	0	1	1.346.337.500	0	110.462.950	0	284.550.550	0	493.274.900	1	1.343.402.300	1	1.343.402.300	1	3.461.869.903	25	205.70			
		5.03.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	15.005.122		0	1	7.500.900	0	0	0	3.124.000	1	7.500.300	1	7.500.300	1	7.500.300	1	7.500.300	100	49.98	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	875.000.000		0	1	876.058.000	0	0	0	75.600.000	0	75.600.000	1	873.350.000	1	873.350.000	1	873.350.000	100	99.81	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	61.199.380		0	1	2.187.900	0	397.800	0	978.400	0	1.557.100	1	2.153.800	1	2.153.800	1	2.153.800	100	3.52	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	51.565.800		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	139.333.273		0	1	68.324.100	0	0	0	31.941.800	0	56.274.100	1	68.324.100	1	68.324.100	1	68.324.100	100	49.04	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, (Satuan: Dokumen)	12	100.920.161		0	12	83.856.200	3	10.995.300	6	34.503.300	9	56.998.600	12	83.663.700	12	83.663.700	12	83.663.700	100	82.90	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	139.333.273		0	1	183.975.700	0	81.670.750	0	89.460.750	1	178.386.200	1	183.975.700	1	183.975.700	1	183.975.700	100	132.04	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, (Satuan: Laporan)	12	48.139.608		0	12	15.301.200	3	2.835.300	6	6.990.600	9	11.145.900	12	15.301.200	12	15.301.200	12	15.301.200	100	31.79	SEKRETARIAT BKPSDM		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RPKD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15
		5.03.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, (Satuan: Laporan)	12	122.465.815		0	12	102.927.600	3	14.563.800	6	39.017.600	9	101.322.800	12	102.927.600	12	102.927.600	12	102.927.600	100	84.05	SEKRETARIAT BKPSDM
		5.03.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, (Satuan: Dokumen)	12	130.000.000		0	12	6.205.900	0	0	6	2.934.100	9	4.489.900	12	6.205.900	12	6.205.900	12	6.205.900	100	4.77	SEKRETARIAT BKPSDM
		5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.03.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan, (Satuan: Unit)	7	2.329.250.000		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKPSDM	
		5.03.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, (Satuan: Unit)	2	609.000.000		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKPSDM	
		5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	1.263.556.600	1	0	1	371.786.300	0	67.514.589	0	135.078.540	0	209.028.018	1	288.978.788	1	288.978.788	1	1.294.647.875	25	102.46	
		5.03.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	12	900.000.000		0	12	328.761.200	3	61.844.589	6	119.658.540	9	180.378.018	12	245.954.288	12	245.954.288	12	245.954.288	100	27.33	SEKRETARIAT BKPSDM
		5.03.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	1	61.056.600		0	1	43.025.100	0	5.670.000	0	15.420.000	0	28.650.000	1	43.024.500	1	43.024.500	1	43.024.500	100	70.47	SEKRETARIAT BKPSDM
		5.03.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	12	302.500.000		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKPSDM	
		5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	1.436.505.634	1	0	1	340.598.600	0	38.346.250	0	77.404.400	0	140.834.450	1	330.673.925	1	330.673.925	1	2.114.216.455	25	147.18	
		5.03.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, (Satuan: Unit)	23	500.000.000		0	23	22.565.000	0	0	0	0	0	15.495.700	23	16.359.700	23	16.359.700	23	16.359.700	100	3.27	SEKRETARIAT BKPSDM
		5.03.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, (Satuan: Unit)	1	16.505.634		0	1	10.189.000	1	2.252.250	1	4.504.500	1	6.756.750	1	9.009.000	1	9.009.000	1	9.009.000	100	54.58	SEKRETARIAT BKPSDM
		5.03.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: Unit)	2	920.000.000		0	2	307.844.600	2	36.094.000	2	72.899.900	2	118.582.000	2	305.305.225	2	305.305.225	2	305.305.225	100	33.19	SEKRETARIAT BKPSDM
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	10.764.686.913	100	142.214.050	100	259.465.700	25	12.529.800	25	146.194.400	75	170.796.700	100	242.638.000	100	242.638.000	100	678.035.130	100	6.30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15
	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel			Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	4.646.049.192	93.90	93.467.600	100	206.942.500	25	5.175.000	25	11.916.500	75	39.698.700	100	185.874.900	100	185.874.900	100	859.195.400	100	18.49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya Aparatur yang Profesional			Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	10.06	28.277.277.327	9.86	668.274.927	10.06	324.957.600	0	10.283.000	0	121.027.052	69.71	247.904.552	69.71	320.011.852	69.71	320.011.852	69.71	1.726.551.910	692.94	6.11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian			Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	17.326.416.846	100	453.287.604	100	583.953.200	25	92.879.420	25	123.345.520	75	336.663.200	100	529.732.630	100	529.732.630	100	2.209.048.126	100	12.75	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya Aparatur yang Profesional			Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	75	36.983.339.600	75	1.603.207.228	75	1.120.599.900	0	123.230.930	0	299.839.830	0	512.733.830	75	1.065.960.844	75	1.065.960.844	75	6.825.032.884	100	18.45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	91.01	5.153.049.289	90.64	123.823.649	91.01	177.938.800	25	3.337.000	25	10.181.000	75	71.655.800	91.01	167.600.700	91.01	167.600.700	91.01	899.451.546	100	17.45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN, (Satuan: Regulasi)	1	7.834.944.107	1	0	1	1.074.005.500	0	61.002.900	0	187.582.500	0	386.595.800	1	959.335.314	1	959.335.314	1	4.262.600.314	100	54.40	
		5.03.02.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, (Satuan: Dokumen)	1	4.685.120.000		0	1	539.665.700	0	45.857.500	0	110.414.000	0	188.613.700	1	490.899.814	1	490.899.814	1	490.899.814	100	10.48	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
		5.03.02.2.01.0005.	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN, (Satuan: Dokumen)	1	444.445.077		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
		5.03.02.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, (Satuan: Dokumen)	12	337.647.400		0	12	196.019.900	3	5.430.400	6	20.100.800	9	94.104.500	12	172.139.500	12	172.139.500	12	172.139.500	100	50.98	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
		5.03.02.2.01.0007.	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN, (Satuan: Dokumen)	1	68.039.900		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
		5.03.02.2.01.0008.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi, (Satuan: Lembaga)	1	1.150.847.965		0	1	107.999.500	0	3.000.000	0	42.431.000	0	59.949.200	1	102.336.700	1	102.336.700	1	102.336.700	100	8.89	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
		5.03.02.2.01.0010.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, (Satuan: Dokumen)	1	362.855.180		0	1	114.563.600	0	3.321.000	0	10.062.500	0	10.062.500	1	102.303.000	1	102.303.000	1	102.303.000	100	28.19	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RPKD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%	15	
		5.03.02.2.01.0011.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian, (Satuan: Dokumen)	6	91.655.126		0	6	23.377.900	0	1.540.000	0	2.720.200	0	4.229.700	6	8.084.400	6	8.084.400	6	8.084.400	100	8.82	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
		5.03.02.2.01.0012.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, (Satuan: Laporan)	1	694.333.459		0	1	92.378.900	0	1.854.000	0	1.854.000	0	29.636.200	1	83.571.900	1	83.571.900	1	83.571.900	100	12.04	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
		5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, (Satuan: BA)	4	1.882.491.200	1	0	1	604.817.800	0	156.002.450	0	268.054.850	0	460.099.850	1	599.004.530	1	599.004.530	1	3.431.803.677	25	182.30	
		5.03.02.2.02.0001.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah, (Satuan: Dokumen)	1	800.000.000		0	1	205.468.000	0	6.438.500	0	46.289.000	1	83.862.000	1	205.071.700	1	205.071.700	1	205.071.700	100	25.63	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, (Satuan: Dokumen)	14	632.491.200		0	14	162.123.100	3	78.629.020	5	78.629.020	9	158.206.520	14	161.622.500	14	161.622.500	14	161.622.500	100	25.55	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.02.0003.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN, (Satuan: Dokumen)	1	450.000.000		0	1	237.226.700	0	70.934.930	0	143.136.830	0	218.031.330	1	232.310.330	1	232.310.330	1	232.310.330	100	51.62	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, (Satuan: BA)	4	11.266.758.281	1	0	1	543.343.900	0	10.283.000	0	121.027.052	0	281.381.352	1	534.416.952	1	534.416.952	1	3.706.004.852	25	32.89	
		5.03.02.2.03.0001.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya, (Satuan: Orang)	250	2.470.269.376		0	250	207.325.000	0	8.714.000	0	69.159.500	12008	153.011.000	15399	206.218.500	15399	206.218.500	15399	206.218.500	6159.60	8.35	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
		5.03.02.2.03.0002.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center, (Satuan: Dokumen)	1	1.200.000.000		0	1	138.239.500	0	0	0	0	0	22.226.800	1	137.679.000	1	137.679.000	1	137.679.000	100	11.47	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.03.0003.	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, (Satuan: Dokumen)	1	1.092.552.107		0	1	85.381.600	0	1.569.000	0	43.089.000	1	81.489.000	1	85.189.000	1	85.189.000	1	85.189.000	100	7.80	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
		5.03.02.2.03.0004.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan, (Satuan: Orang)	100	1.000.000.000		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
		5.03.02.2.03.0005.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, (Satuan: Dokumen)	1	62.458.798		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
		5.03.02.2.03.0006.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan , (Satuan: Orang)	120	1.819.876.300		0	120	80.146.800	0	0	0	0	75	11.250.000	75	76.726.100	75	76.726.100	75	76.726.100	62.50	4.22	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.03.0008.	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, (Satuan: Orang)	120	1.601.725.400		0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.03.0013.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina , (Satuan: Orang)	500	200.000.000		0	500	17.203.900	0	0	0	1.518.600	100	4.193.600	100	13.734.800	100	13.734.800	100	13.734.800	20	6.87	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15		
		5.03.02.2.03.0014.	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir, (Satuan: Orang)	100	1.819.876.300		0	100	15.047.100	0	0	0	7.259.952	244	9.210.952	304	14.869.552	304	14.869.552	304	14.869.552	304	0.82	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN		
		5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, (Satuan: BA)	4	2.520.653.962	1	0	1	451.690.500	0	20.146.800	0	135.839.900	0	251.375.780	1	419.062.130	1	419.062.130	1	1.796.906.153	25	71.29			
		5.03.02.2.04.0001.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, (Satuan: Dokumen)	1	187.470.684		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0002.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, (Satuan: Dokumen)	12	436.561.428		0	12	151.466.200	3	9.529.800	6	103.763.400	9	110.847.500	12	140.301.300	12	140.301.300	12	140.301.300	100	32.14	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0004.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan , (Satuan: Orang)	9	323.991.900		0	9	107.985.800	0	1.206.000	0	4.938.000	9	45.188.800	9	105.310.700	9	105.310.700	9	105.310.700	100	32.50	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0005.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa , (Satuan: Orang)	150	400.000.000		0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0007.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan , (Satuan: Orang)	73	349.024.090		0	73	87.338.700	0	3.928.000	0	13.477.000	73	59.163.980	73	78.536.130	73	78.536.130	73	78.536.130	100	22.50	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0008.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, (Satuan: Laporan)	12	460.605.860		0	12	69.953.000	3	2.131.000	6	5.243.000	9	26.467.000	12	62.290.000	12	62.290.000	12	62.290.000	100	13.52	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0009.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani, (Satuan: Dokumen)	12	363.000.000		0	12	34.946.800	3	3.352.000	6	8.418.500	9	9.708.500	12	32.624.000	12	32.624.000	12	32.624.000	100	8.99	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																											
8	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	10.06	46.353.848.521	9.86	1.108.487.400	10.06	2.941.369.100	0	2.322.500	0	385.786.000	69.71	536.322.500	69.71	2.906.350.800	69.71	2.906.350.800	69.71	9.996.598.048	692.94	21.57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, (Satuan: BA)	4	1.188.556.380	1	0	1	134.757.000	0	0	0	0	0	2.699.000	1	133.482.000	1	133.482.000	1	1.362.966.600	25	114.67			
		5.04.02.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi, (Satuan: Orang)	110	1.188.556.380		0	110	134.757.000	0	0	0	0	90	2.699.000	140	133.482.000	140	133.482.000	140	133.482.000	127.27	11.23	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15	
		5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, (Satuan: BA)	4	8.432.400.077	1	0	1	2.806.612.100	0	2.322.500	0	385.786.000	0	533.623.500	1	2.772.868.800	1	2.772.868.800	1	8.633.631.448	25	102.39		
		5.04.02.2.02.0001.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun, (Satuan: Dokumen)	1	113.694.758		0	1	50.688.500	0	780.000	0	1.921.500	0	23.961.500	1	49.482.700	1	49.482.700	1	49.482.700	100	43.52	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	
		5.04.02.2.02.0007.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, (Satuan: Laporan)	1	8.318.705.319		0	1	2.755.923.600	0	1.542.500	0	383.864.500	0	509.662.000	1	2.723.386.100	1	2.723.386.100	1	2.723.386.100	100	32.74	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	
Rata-rata capaian kinerja (%)											9,60	17,80	15,02	41,36	121,34	63,17	180,18	96,48								
Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*) :																										

Sumber, 17 Januari 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

#

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Lampiran 4. Matrik Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643
[Website : inspektorat.cirebonkab.go.id](http://inspektorat.cirebonkab.go.id) email inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

**CATATAN HASIL REVIU
ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2023 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/675-Sekrt tanggal 15 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai dari tanggal 4 s/d 26 Maret 2024.

B. Penilaian

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, diperoleh hasil, sbb :

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nilai Angka Evaluasi AKIP : 73.60
Kategori Predikat : BB (Sangat Baik)
Dengan Catatan sebagai berikut :

A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan (Pohon Kinerja) harus dibedakan dengan Cascading yang menunjukkan secara detail.
B.	PENGUKURAN KINERJA
2.	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
C.	PELAPORAN KINERJA
3.	Dokumen Laporan Kinerja belum direviu secara internal Perangkat Daerah.
4.	Dasar Hukum Pembuatan Laporan Kinerja belum lengkap.
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
5.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan di Perangkat Daerah.

C. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, agar :

A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	Membuat Dokumen Pohon Kinerja.
B.	PENGUKURAN KINERJA
2.	Membuat Laporan Pencapaian Kinerja Unit atau Bidang di Perangkat Daerah sesuai Target yang telah ditetapkan.
C.	PELAPORAN KINERJA
3.	Membuat SK Tim Reviu Internal LAKIP dan Berita Acara telah direviu secara Internal yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.
4.	Menambahkan Dasar Hukum pada LAKIP sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
5.	Membuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP secara Mandiri yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.

E. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Tindaklanjuti hasil evaluasi Akip Tahun 2022 oleh APIP belum ditindaklanjuti sebanyak 0 temuan.

Demikian Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, kiranya menjadi maklum dan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.

Sumber, 26 Maret 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681022 198803 1 001

Wakil Penanggung Jawab



EUIS SITI SONDARI, S.Sos
NIP. 19690206 198903 2 005

MATRIKS TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU
ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAJAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON

NO.	REKOMENDASI CHR 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	PERENCANAAN KINERJA					
	1. Membuat Dokumen Pohon Kinerja.	Telah dibuat Dokumen Pohon Kinerja sebagaimana terlampir dalam Dokumen LKIP BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2023.	1 Dokumen Pohon Kinerja	Akhir Bulan Maret 2024	SEKRETARIAT BKPSDM	TELAH SELESAI (Data Terlampir)
B.	PENGUKURAN KINERJA					
	2. Membuat Laporan Pencapaian Kinerja Unit atau Bidang di Perangkat Daerah sesuai Target yang telah ditetapkan.	Telah dibuat Laporan Pencapaian Kinerja Bidang-Bidang di BKPSDM Kabupaten Cirebon sesuai target yang telah ditetapkan sebagaimana hasil akhir data SIMONEK per Desember Tahun Anggaran 2023.	1 Laporan Rekapitulasi Pencapaian Kinerja pada 4 Bidang pada BKPSDM Kab. Cirebon (PPI, PKK, PKA dan PKAP).	Akhir Bulan Maret 2024	SEKRETARIAT BKPSDM	TELAH SELESAI (Data Terlampir)
C.	PELAPORAN KINERJA					
	3. Membuat SK Tim Reviu Internal LAKIP dan Berita Acara telah direviu secara Internal yang ditandatangani oleh Kepala Badan.	Telah dibuat SK Tim Reviu Internal LAKIP dan Berita Acara telah direviu secara Internal yang ditandatangani oleh Kepala Badan.	1 Berkas SK Tim Reviu Internal LAKIP dan Berita Acara Reviu Internal LAKIP 2023.	Akhir Bulan Maret 2024	SEKRETARIAT BKPSDM	TELAH SELESAI (Data Terlampir)
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
	4. Menambahkan Dasar Hukum pada LAKIP sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Telah ditambahkan Dasar Hukum pada LAKIP Tahun 2023 sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	1 Dokumen LKIP Tahun 2023.	Akhir Bulan Maret 2024	SEKRETARIAT BKPSDM	TELAH SELESAI (Perubahan langsung dalam Dokumen LKIP BKPSDM 2023)
	5. Membuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP secara Mandiri yang ditandatangani oleh Kepala Badan.	Telah dibuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP secara Mandiri yang ditandatangani oleh Kepala Badan.	1 Laporan LHE LAKIP mandiri	Akhir Bulan Maret 2024	SEKRETARIAT BKPSDM	TELAH SELESAI (Data Terlampir)

Sumber, Maret 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAJAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Lampiran 5. Penghargaan yang diterima.

No	Uraian secara Detail	Bukti Dukung (Foto)
JUNI		
1.	<p>Penghargaan dari BKN Nomor 01/MP.03/PP/2024 sebagai Instansi Dengan Pemanfaatan SIASN Terbaik Layanan SKK Kategori Penetapan Tewas 13 Juni 2024</p> <p>Dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Mutasi Kepegawaian tanggal 13 Juni 2024 bertempat di el Hotel Bandung Jawa Barat</p>	
JULI		
2.	<p>Piagam Penghargaan dari Kanreg III BKN Bandung, Peringkat II Kategori Integrasi Sistem Informasi Instansi dengan SIASN 12 Juli 2024</p> <p>Dalam acara sosialisasi Manajemen ASN Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Apresiasi Mitra Kerja Terbaik Kantor Regional III BKN Bandung 12 Juli 2024 bertempat di el Hotel Bandung Jawa Barat</p>	

3. Piagam Penghargaan dari Kanreg III BKN Bandung, Peringkat III Kategori Pelayanan Kenaikan Pangkat 12 Juli 2024

Dalam acara sosialisasi Manajemen ASN Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Apresiasi Mitra Kerja Terbaik Kantor Regional III BKN Bandung 12 Juli 2024 bertempat di el Hotel Bandung Jawa Barat



4. Piagam Penghargaan dari Kanreg III BKN Bandung, Peringkat III Kategori Pelayanan Pensiun PNS dan Janda/Dudanya 12 Juli 2024

Dalam acara sosialisasi Manajemen ASN Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Apresiasi Mitra Kerja Terbaik Kantor Regional III BKN Bandung 12 Juli 2024 bertempat di el Hotel Bandung Jawa Barat



OKTOBER

1. Piagam Penghargaan dari DINKES Provinsi Jawa Barat, Peringkat Ke-5 Kategori Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Medis Prioritas Terbaik Kategori Kabupaten Terbaik.

Dalam Acara Pertemuan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Bandung 16-18 Oktober 2024 bertempat di Holiday inn Bandung.



Dipindai dengan
CamScanner

2. Piagam Penghargaan dari DINKES Provinsi Jawa Barat, Peringkat ke-1 Kategori Pembukaan Formasi SDM Kesehatan Terbanyak Tahun 2023 dan 2024 di Kategori Kabupaten Terbaik

Dalam Acara Pertemuan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Bandung 16-18 Oktober 2024 bertempat di Holiday inn Bandung.



Dipindai dengan
CamScanner

3.	<p>Piagam Penghargaan dari DINKES Provinsi Jawa Barat, Apresiasi Penyelesaian PTT Peringkat Ke-1</p> <p>Dalam Acara Pertemuan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Bandung 16-18 Oktober 2024 bertempat di Holiday inn Bandung.</p>	 <p>The certificate is titled 'SERTIFIKAT Apresiasi' and is numbered 'NOMOR: 35300/KS.01/SDK'. It is awarded to 'Kabupaten Cirebon' for 'Apresiasi Penyelesaian PTT'. The text states that the recipient attended the 'Pertemuan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Provinsi Jawa Barat' on '16-18 Oktober 2024' in 'Bandung'. The date of issuance is 'Bandung, 15 Oktober 2024'. The official is 'KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT', signed by 'RADEN VINI ADIANI DEWI, Pembina Utama Muda'. A small logo of the health department is also present. A 'CamScanner' watermark is visible in the bottom right corner.</p>
----	--	--

DESEMBER

1.	<p>Piagam Penghargaan BKN Pusat atas keberhasilan menerapkan SISTEM MERIT dalam Manajemen ASN dengan Predikat BAIK</p> <p>Dalam Acara Penyampaian Hasil Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Instans Pemerintah Tahun 2024, Jakarta 19 Desember 2024 bertempat di Ballroom Pulman Central Park, Jakarta</p>	 <p>The award is a blue plaque with a gold border, titled 'PIAGAM PENGHARGAAN'. It is awarded to 'PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON' for 'ATAS KEBERHASILAN MENERAPKAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA' with the predikat 'BAIK'. The date is 'Jakarta, 19 Desember 2024' and the official is 'Pit. Kepala Badan Kepegawaian Negara', signed by 'Haryono Dwi Putranto'. Logos for BKN, ASN, and RATA are visible at the bottom.</p>
----	---	---

2. Sertifikat ISO 9001:2015 yang di terbitkan oleh TUV Rheiland dengan Nomor Sertifikat 01 100 1327154 terhadap 7 Layanan Kepegawaiaan yang terdiri dari Pelayanan Pemberkasan Pensiun, KARIS/KARSU, Izin Belajar, Izin Cuti, Izin Cerai, Rekomendasi TPP, Kenaikan Gaji Berkala.

Sertifikat

Standar

ISO 9001:2015

No. Registr. Sertifikat

01 100 1327154

Pemilik Sertifikat:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Muria No. 100, Sumber, Kabupaten Cirebon,
45611, Jawa Barat, Indonesia

Ruang Lingkup:

Pelayanan Publik untuk 7 Layanan: Izin Cerai, Izin Cuti, Izin Belajar, Rekomendasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Usul Pensiun, Kartu Pegawai (Karpeg)/ Kartu Istri (Karis)/ Kartu Suami (Karsu)

Masa Berlaku:

Sertifikat ini berlaku dari 05.01.2025 sampai 04.01.2028.
Sertifikasi yang pertama 2022

31.12.2024


TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein - 51105 Köln

www.tuv.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-24103 41-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN / KOTA
KABUPATEN CIREBON
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024

- Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:
- 1. Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel 100 Prosen
 - 2. Meningkatnya Aparatur yang Profesional 75 Prosen
 - 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian 95 Nilai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15		
	5.03. KEPEGAWAIAN																										
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	10.499.712.972	100	740.244.039	100	1.711.917.900	25	177.977.539	25	416.694.990	75	697.813.018	100	1.626.175.188	100	1.626.175.188	100	4.683.577.778	100	44.61	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Meningkatnya disiplin aparatur, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	57.189.500.720	100	13.627.702.635	100	16.281.092.000	25	3.809.973.266	25	8.347.206.475	75	12.393.966.332	100	15.730.172.533	100	15.730.172.533	100	50.846.516.772	100	88.91	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	1.154.363.025	100	74.412.000	100	103.226.000	0	0	0	1.467.000	93.73	33.625.000	95.09	98.082.640	95.09	98.082.640	100	369.638.540	100	32.02	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	394.348.791	100	16.456.300	100	16.306.600	25	6.536.700	25	11.267.700	75	16.306.600	100	16.306.600	100	16.306.600	100	89.297.600	100	22.64	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Terkembangnya sistem perencanaan sektoral, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	173.368.080	100	11.850.000	100	12.187.500	0	4.950.000	0	7.185.000	100	12.187.500	100	12.187.500	100	12.187.500	100	64.668.400	100	37.30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	16.148.504.673	100	409.862.488	100	346.804.500	25	38.346.250	25	80.338.500	75	145.324.350	100	336.879.825	100	336.879.825	100	2.678.156.455	100	16.58	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		5.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	310.832.875	1	0	1	120.144.500	0	4.950.000	0	13.383.000	0	50.543.500	1	115.001.140	1	115.001.140	1	469.491.940	25	151.04			
		5.03.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah , (Satuan: Dokumen)	3	53.368.080		0	3	12.187.500	0	4.950.000	1	7.185.000	3	12.187.500	3	12.187.500	3	12.187.500	3	12.187.500	100	22.84	SEKRETARIAT BKPSDM		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RPKD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15		
		5.03.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan: Laporan)	2	23.910.451		0	2	4.731.000	0	0	2	4.731.000	2	4.731.000	2	4.731.000	2	4.731.000	2	4.731.000	100	19.79	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: Laporan)	8	233.554.344		0	8	103.226.000	0	0	2	1.467.000	6	33.625.000	8	98.082.640	8	98.082.640	8	98.082.640	100	42	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	12.564.828.120	1	0	1	16.292.667.600	0	3.816.509.966	0	8.353.743.175	0	12.405.541.932	1	15.741.748.133	1	15.741.748.133	1	50.844.572.372	25	404.66			
		5.03.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang/bulan)	12	12.503.000.000		0	12	16.281.092.000	3	3.809.973.266	3	8.347.206.475	9	12.393.966.332	12	15.730.172.533	12	15.730.172.533	12	15.730.172.533	100	125.81	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		5.03.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan)	1	19.602.659		0	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	1	6.536.700	100	33.35	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, (Satuan: Laporan)	13	42.225.461		0	13	5.038.900	0	0	0	0	10	5.038.900	13	5.038.900	13	5.038.900	13	5.038.900	100	11.93	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	1.682.962.432	1	0	1	1.346.337.500	0	110.462.950	0	284.550.550	0	493.274.900	1	1.343.402.300	1	1.343.402.300	1	3.461.869.903	25	205.70			
		5.03.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	15.005.122		0	1	7.500.900	0	0	0	3.124.000	1	7.500.300	1	7.500.300	1	7.500.300	1	7.500.300	100	49.98	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	875.000.000		0	1	876.058.000	0	0	0	75.600.000	0	75.600.000	1	873.350.000	1	873.350.000	1	873.350.000	100	99.81	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	61.199.380		0	1	2.187.900	0	397.800	0	978.400	0	1.557.100	1	2.153.800	1	2.153.800	1	2.153.800	100	3.52	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	51.565.800		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	139.333.273		0	1	68.324.100	0	0	0	31.941.800	0	56.274.100	1	68.324.100	1	68.324.100	1	68.324.100	100	49.04	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, (Satuan: Dokumen)	12	100.920.161		0	12	83.856.200	3	10.995.300	6	34.503.300	9	56.998.600	12	83.663.700	12	83.663.700	12	83.663.700	100	82.90	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1	139.333.273		0	1	183.975.700	0	81.670.750	0	89.460.750	1	178.386.200	1	183.975.700	1	183.975.700	1	183.975.700	100	132.04	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, (Satuan: Laporan)	12	48.139.608		0	12	15.301.200	3	2.835.300	6	6.990.600	9	11.145.900	12	15.301.200	12	15.301.200	12	15.301.200	100	31.79	SEKRETARIAT BKPSDM		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RPKD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15		
		5.03.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, (Satuan: Laporan)	12	122.465.815		0	12	102.927.600	3	14.563.800	6	39.017.600	9	101.322.800	12	102.927.600	12	102.927.600	12	102.927.600	100	84.05	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, (Satuan: Dokumen)	12	130.000.000		0	12	6.205.900	0	0	6	2.934.100	9	4.489.900	12	6.205.900	12	6.205.900	12	6.205.900	100	4.77	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		5.03.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan, (Satuan: Unit)	7	2.329.250.000		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, (Satuan: Unit)	2	609.000.000		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	1.263.556.600	1	0	1	371.786.300	0	67.514.589	0	135.078.540	0	209.028.018	1	288.978.788	1	288.978.788	1	1.294.647.875	25	102.46			
		5.03.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	12	900.000.000		0	12	328.761.200	3	61.844.589	6	119.658.540	9	180.378.018	12	245.954.288	12	245.954.288	12	245.954.288	100	27.33	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	1	61.056.600		0	1	43.025.100	0	5.670.000	0	15.420.000	0	28.650.000	1	43.024.500	1	43.024.500	1	43.024.500	100	70.47	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	12	302.500.000		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	1.436.505.634	1	0	1	340.598.600	0	38.346.250	0	77.404.400	0	140.834.450	1	330.673.925	1	330.673.925	1	2.114.216.455	25	147.18			
		5.03.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, (Satuan: Unit)	23	500.000.000		0	23	22.565.000	0	0	0	0	0	15.495.700	23	16.359.700	23	16.359.700	23	16.359.700	100	3.27	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, (Satuan: Unit)	1	16.505.634		0	1	10.189.000	1	2.252.250	1	4.504.500	1	6.756.750	1	9.009.000	1	9.009.000	1	9.009.000	100	54.58	SEKRETARIAT BKPSDM		
		5.03.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: Unit)	2	920.000.000		0	2	307.844.600	2	36.094.000	2	72.899.900	2	118.582.000	2	305.305.225	2	305.305.225	2	305.305.225	100	33.19	SEKRETARIAT BKPSDM		
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian	5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	10.764.686.913	100	142.214.050	100	259.465.700	25	12.529.800	25	146.194.400	75	170.796.700	100	242.638.000	100	242.638.000	100	678.035.130	100	6.30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15		
	Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel			Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	4.646.049.192	93.90	93.467.600	100	206.942.500	25	5.175.000	25	11.916.500	75	39.698.700	100	185.874.900	100	185.874.900	100	859.195.400	100	18.49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	Meningkatnya Aparatur yang Profesional			Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	10.06	28.277.277.327	9.86	668.274.927	10.06	324.957.600	0	10.283.000	0	121.027.052	69.71	247.904.552	69.71	320.011.852	69.71	320.011.852	69.71	1.726.551.910	692.94	6.11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian			Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	17.326.416.846	100	453.287.604	100	583.953.200	25	92.879.420	25	123.345.520	75	336.663.200	100	529.732.630	100	529.732.630	100	2.209.048.126	100	12.75	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	Meningkatnya Aparatur yang Profesional			Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	75	36.983.339.600	75	1.603.207.228	75	1.120.599.900	0	123.230.930	0	299.839.830	0	512.733.830	75	1.065.960.844	75	1.065.960.844	75	6.825.032.884	100	18.45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	91.01	5.153.049.289	90.64	123.823.649	91.01	177.938.800	25	3.337.000	25	10.181.000	75	71.655.800	91.01	167.600.700	91.01	167.600.700	91.01	899.451.546	100	17.45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN, (Satuan: Regulasi)	1	7.834.944.107	1	0	1	1.074.005.500	0	61.002.900	0	187.582.500	0	386.595.800	1	959.335.314	1	959.335.314	1	4.262.600.314	100	54.40			
		5.03.02.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, (Satuan: Dokumen)	1	4.685.120.000		0	1	539.665.700	0	45.857.500	0	110.414.000	0	188.613.700	1	490.899.814	1	490.899.814	1	490.899.814	100	10.48	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI		
		5.03.02.2.01.0005.	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN, (Satuan: Dokumen)	1	444.445.077		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI		
		5.03.02.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, (Satuan: Dokumen)	12	337.647.400		0	12	196.019.900	3	5.430.400	6	20.100.800	9	94.104.500	12	172.139.500	12	172.139.500	12	172.139.500	100	50.98	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI		
		5.03.02.2.01.0007.	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN, (Satuan: Dokumen)	1	68.039.900		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI		
		5.03.02.2.01.0008.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi, (Satuan: Lembaga)	1	1.150.847.965		0	1	107.999.500	0	3.000.000	0	42.431.000	0	59.949.200	1	102.336.700	1	102.336.700	1	102.336.700	100	8.89	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI		
		5.03.02.2.01.0010.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, (Satuan: Dokumen)	1	362.855.180		0	1	114.563.600	0	3.321.000	0	10.062.500	0	10.062.500	1	102.303.000	1	102.303.000	1	102.303.000	100	28.19	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPd Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%	15	
		5.03.02.2.01.0011.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian, (Satuan: Dokumen)	6	91.655.126		0	6	23.377.900	0	1.540.000	0	2.720.200	0	4.229.700	6	8.084.400	6	8.084.400	6	8.084.400	100	8.82	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
		5.03.02.2.01.0012.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, (Satuan: Laporan)	1	694.333.459		0	1	92.378.900	0	1.854.000	0	1.854.000	0	29.636.200	1	83.571.900	1	83.571.900	1	83.571.900	100	12.04	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
		5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, (Satuan: BA)	4	1.882.491.200	1	0	1	604.817.800	0	156.002.450	0	268.054.850	0	460.099.850	1	599.004.530	1	599.004.530	1	3.431.803.677	25	182.30	
		5.03.02.2.02.0001.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah, (Satuan: Dokumen)	1	800.000.000		0	1	205.468.000	0	6.438.500	0	46.289.000	1	83.862.000	1	205.071.700	1	205.071.700	1	205.071.700	100	25.63	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, (Satuan: Dokumen)	14	632.491.200		0	14	162.123.100	3	78.629.020	5	78.629.020	9	158.206.520	14	161.622.500	14	161.622.500	14	161.622.500	100	25.55	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.02.0003.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN, (Satuan: Dokumen)	1	450.000.000		0	1	237.226.700	0	70.934.930	0	143.136.830	0	218.031.330	1	232.310.330	1	232.310.330	1	232.310.330	100	51.62	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, (Satuan: BA)	4	11.266.758.281	1	0	1	543.343.900	0	10.283.000	0	121.027.052	0	281.381.352	1	534.416.952	1	534.416.952	1	3.706.004.852	25	32.89	
		5.03.02.2.03.0001.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya, (Satuan: Orang)	250	2.470.269.376		0	250	207.325.000	0	8.714.000	0	69.159.500	12008	153.011.000	15399	206.218.500	15399	206.218.500	15399	206.218.500	6159.60	8.35	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
		5.03.02.2.03.0002.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center, (Satuan: Dokumen)	1	1.200.000.000		0	1	138.239.500	0	0	0	0	0	22.226.800	1	137.679.000	1	137.679.000	1	137.679.000	100	11.47	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.03.0003.	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, (Satuan: Dokumen)	1	1.092.552.107		0	1	85.381.600	0	1.569.000	0	43.089.000	1	81.489.000	1	85.189.000	1	85.189.000	1	85.189.000	100	7.80	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
		5.03.02.2.03.0004.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan, (Satuan: Orang)	100	1.000.000.000		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
		5.03.02.2.03.0005.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, (Satuan: Dokumen)	1	62.458.798		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
		5.03.02.2.03.0006.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan , (Satuan: Orang)	120	1.819.876.300		0	120	80.146.800	0	0	0	0	75	11.250.000	75	76.726.100	75	76.726.100	75	76.726.100	62.50	4.22	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.03.0008.	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, (Satuan: Orang)	120	1.601.725.400		0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
		5.03.02.2.03.0013.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina , (Satuan: Orang)	500	200.000.000		0	500	17.203.900	0	0	0	1.518.600	100	4.193.600	100	13.734.800	100	13.734.800	100	13.734.800	20	6.87	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15		
		5.03.02.2.03.0014.	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir, (Satuan: Orang)	100	1.819.876.300		0	100	15.047.100	0	0	0	7.259.952	244	9.210.952	304	14.869.552	304	14.869.552	304	14.869.552	304	0.82	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN		
		5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, (Satuan: BA)	4	2.520.653.962	1	0	1	451.690.500	0	20.146.800	0	135.839.900	0	251.375.780	1	419.062.130	1	419.062.130	1	1.796.906.153	25	71.29			
		5.03.02.2.04.0001.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, (Satuan: Dokumen)	1	187.470.684		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0002.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, (Satuan: Dokumen)	12	436.561.428		0	12	151.466.200	3	9.529.800	6	103.763.400	9	110.847.500	12	140.301.300	12	140.301.300	12	140.301.300	100	32.14	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0004.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan , (Satuan: Orang)	9	323.991.900		0	9	107.985.800	0	1.206.000	0	4.938.000	9	45.188.800	9	105.310.700	9	105.310.700	9	105.310.700	100	32.50	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0005.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa , (Satuan: Orang)	150	400.000.000		0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0007.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan , (Satuan: Orang)	73	349.024.090		0	73	87.338.700	0	3.928.000	0	13.477.000	73	59.163.980	73	78.536.130	73	78.536.130	73	78.536.130	100	22.50	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0008.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, (Satuan: Laporan)	12	460.605.860		0	12	69.953.000	3	2.131.000	6	5.243.000	9	26.467.000	12	62.290.000	12	62.290.000	12	62.290.000	100	13.52	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
		5.03.02.2.04.0009.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani, (Satuan: Dokumen)	12	363.000.000		0	12	34.946.800	3	3.352.000	6	8.418.500	9	9.708.500	12	32.624.000	12	32.624.000	12	32.624.000	100	8.99	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																											
8	Meningkatnya Aparatur yang Profesional	5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	10.06	46.353.848.521	9.86	1.108.487.400	10.06	2.941.369.100	0	2.322.500	0	385.786.000	69.71	536.322.500	69.71	2.906.350.800	69.71	2.906.350.800	69.71	9.996.598.048	692.94	21.57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, (Satuan: BA)	4	1.188.556.380	1	0	1	134.757.000	0	0	0	0	0	2.699.000	1	133.482.000	1	133.482.000	1	1.362.966.600	25	114.67			
		5.04.02.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi, (Satuan: Orang)	110	1.188.556.380		0	110	134.757.000	0	0	0	0	90	2.699.000	140	133.482.000	140	133.482.000	140	133.482.000	127.27	11.23	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPD Thn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15	
		5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, (Satuan: BA)	4	8.432.400.077	1	0	1	2.806.612.100	0	2.322.500	0	385.786.000	0	533.623.500	1	2.772.868.800	1	2.772.868.800	1	8.633.631.448	25	102.39		
		5.04.02.2.02.0001.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun, (Satuan: Dokumen)	1	113.694.758		0	1	50.688.500	0	780.000	0	1.921.500	0	23.961.500	1	49.482.700	1	49.482.700	1	49.482.700	100	43.52	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	
		5.04.02.2.02.0007.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, (Satuan: Laporan)	1	8.318.705.319		0	1	2.755.923.600	0	1.542.500	0	383.864.500	0	509.662.000	1	2.723.386.100	1	2.723.386.100	1	2.723.386.100	100	32.74	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	
Rata-rata capaian kinerja (%)											9,60	17,80	15,02	41,36	121,34	63,17	180,18	96,48								
Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*) :																										

Sumber, 17 Januari 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

#

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R – 45611

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 800.2/Kep. 26 BKPSDM

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diperlukan pengukuran akuntabilitas kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas :

- a. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja berdasarkan pelaksanaan tupoksi, program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- b. Melakukan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon dan RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2019 -2024.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 2 Januari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 198803 1 001

LAMPIRAN I

Nomor : 800.2/Kep. – BPSDM
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ketua Tim : Sekretaris BKPSDM
Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BKPSDM
Anggota :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
2. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan
3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset
7. Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat
8. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
9. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
10. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan
11. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Kompetensi
12. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 198803 1 001

LAMPIRAN II

Nomor : 800.2/Kep. 26 – BPSDM
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMEINTAH (LKIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

- Penanggung Jawab : Bertanggungjawab dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024
- Ketua Tim : Mengkoordinir proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024
- Sekretaris Tim : Bertanggung Jawab Secara Administrasi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024
- Anggota :
1. Mengkoordinir dan Bertanggung Jawab dalam menghimpun data Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
2. Mengkoordinir dan Bertanggung Jawab dalam menghimpun data Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan;
3. Mengkoordinir dan Bertanggung Jawab dalam menghimpun data Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
4. Mengkoordinir dan Bertanggung Jawab dalam menghimpun data Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
5. Mengkoordinir dan Bertanggung Jawab dalam menghimpun data Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Mengkoordinir dan Bertanggung Jawab dalam menghimpun data Bagian Keuangan dan Aset;
7. Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah
8. Menyiapkan bahan data dan informasi pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
9. Analis Kepegawaian pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
10. Analis Kepegawaian pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan;

11. Analisis Pengembangan Kompetensi pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur; dan
12. Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 198803 1 001